

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris adalah salah satu profesi dibidang hukum yang bertugas memberikan pelayanan hukum serta menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dalam masyarakat. Prinsip dari negara hukum adalah menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Hal ini memberi pengertian bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban mengenai subjek hukum dalam masyarakat.¹ Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Notaris mengemban tanggung jawab yang berkenaan dengan alat bukti yang dapat menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat. Notaris ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk dan apabila undang-undang mengharuskan demikian atau dikehendaki oleh masyarakat membuat alat bukti tertulis tersebut yang mempunyai kekuatan otentik seperti ditentukan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yaitu :

“Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta dibuat”.²

Hal ini memberi pengertian bahwa Notaris oleh undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta autentik itu pada pokoknya dianggap benar.³

¹ Eugenius Sumaryono, *Etika Profesi Hukum (Norma-Norma Bagi Penegak Hukum)*, 2008, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 124.

² *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Ps.1868. cet.September 2010, Permata Pers.

³ Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, 1993, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan) yang merupakan peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) berisikan pengaturan umum tentang Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik.

Berdasarkan pengertian mengenai Notaris serta tugas dan kewenangannya itu apabila dikaitkan dengan Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris maka teranglah bahwa Notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dimana berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepadanya dapat menciptakan alat pembuktian yang mutlak melalui akta otentik yang dibuatnya, dengan pengertian bahwa apa yang dibuat dalam akta otentik tersebut ialah yang dianggap benar sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bahwa :

“Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya”.⁴

Akta otentik menentukan secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terkait dengan akta tersebut, memberikan kepastian hukum dan dengan adanya akta otentik tersebut diharapkan dapat menghindari permasalahan atau sengketa diantara para pihak kelak dikemudian hari. Akan tetapi apabila timbul permasalahan diantara para pihak yang kemudian menimbulkan sengketa tidak dapat dihindari maka dalam proses penyelesaiannya dapat dibantu dengan adanya akta otentik tersebut dimana akta otentik tersebut merupakan alat bukti tertulis terkuat dan penuh yang mampu

⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), op.cit, Ps. 1870.*

memberikan peran nyata dalam penyelesaian permasalahan sengketa diantara para pihak.

Kendala dalam praktek Notaris sekarang ini sudah banyak terjadi di mana akta yang dibuat oleh Notaris sebagai alat bukti otentik dipersoalkan di pengadilan. Dalam setiap pemeriksaan Notaris oleh penyidik ataupun pengadilan, maka akta Notaris sebagai akta otentik akan dijadikan alat bukti dalam setiap proses penyidikan ataupun persidangan. Akta Notaris adalah produk hukum dari Pejabat umum, maka penilaian terhadap akta Notaris harus dilakukan dengan Asas Praduga Sah (*Vermoeden Van rechmatigheid*) atau *Presumptio iustae Causa*.⁵ Asas ini dapat digunakan untuk menilai akta Notaris, yaitu akta Notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah. Kepastian tentang hukum suatu akta yang dibuat oleh Notaris sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Keterangan atau pernyataan yang dituangkan atau dimuat dalam akta atau keterangan para pihak yang diberikan di hadapan Notaris dan para pihak harus dinilai benar.

Salah satu penyebab berhentinya seorang Notaris adalah karena meninggal dunia. Meninggalnya seorang Notaris akan meninggalkan pula permasalahan terkait dengan protokol Notaris. Di dalam UUJN dan UUJNP Pasal 1 butir 13 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶ Penyimpanan dan pemeliharaan Protokol Notaris tersebut terus berlangsung walaupun Notaris yang bersangkutan telah pensiun atau bahkan sudah meninggal dunia. Protokol Notaris tersebut diserahkan kepada Notaris lain sebagai Pemegang Protokol Notaris.

⁵Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, 2011, Refika Aditama, Bandung, hlm. 85.

⁶ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 butir 13.

Protokol Notaris yang diatur dalam undang-undang tersebut merupakan arsip negara yang sangat penting, yang harus dipelihara dan dijaga oleh Notaris karena merupakan alat bukti yang sah dan kuat apabila kelak dikemudian hari terjadi permasalahan diantara para pihak dalam suatu akta. Apabila Notaris yang bersangkutan sudah tidak menjabat lagi sebagai Notaris ataupun karena sesuatu hal menyebabkan Protokol Notaris diserahkan atau berpindah ke Notaris lainnya sebagai Pemegang Protokol Notaris maka apabila para pihak yang tersebut dalam akta atau terkait didalam sebuah akta berkehendak mencari dokumen-dokumen yang pembuatan aktanya pada waktu yang telah lalu maka dokumen-dokumen tersebut akan dapat dengan mudah diketemukan dengan adanya Protokol Notaris dari Notaris tersebut yang telah diserahkan atau berpindah ke Notaris lain yang ditugaskan sebagai Pemegang Protokol Notaris.

Terkait protokol Notaris dalam hal Notaris meninggal dunia telah diatur dalam UUJN dan UUJNP Pasal 63 ayat (2) yaitu :

“Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a (meninggal dunia), penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah”.⁷

Suami atau isteri dari Notaris yang meninggal dunia, atau keluarga sedarah dalam garis keturunan ke atas dan ke bawah tanpa pembatasan, atau dalam garis ke samping sampai derajat ke tiga wajib memberitahukan perihal meninggalnya Notaris tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris setempat. Berdasarkan pemberitahuan tersebut maka untuk selanjutnya Majelis Pengawas Daerah Notaris akan menunjuk Notaris lain sebagai pemegang protokol Notaris dari Notaris yang telah meninggal dunia. Setelah terjadi serah terima dari para ahli waris Notaris kepada Notaris pemegang protokol, kemudian ada protokol Notaris yang pada waktu penyerahan telah berumur 25

⁷ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 63 ayat (2).

(dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol kepada Majelis Pengawas Daerah.⁸

Pengalihan protokol Notaris dari ahli waris Notaris yang telah meninggal dunia kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah selaku pemegang protokol Notaris memang belum diatur secara khusus. Di dalam prakteknya masih banyak para ahli waris Notaris yang belum menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris lain selaku pemegang protokol Notaris. Pengaturan mengenai minuta akta dan protokol Notaris yang terdapat pada UUJN dan UUJNP hanyalah sebatas pada pembuatan, penyimpanan dan penyerahan protokol Notaris serta pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris sebagaimana termuat dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 66. Tidak ada sanksi yang ditujukan kepada ahli waris Notaris apabila tidak segera menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris pemegang protokol.

Kurangnya sosialisasi kepada keluarga Notaris, ahli waris Notaris, karyawan dan masyarakat pada umumnya mengenai protokol Notaris dan akta otentik sebagai alat bukti menyebabkan terjadinya permasalahan-permasalahan yang akan mengakibatkan kerugian pada masyarakat, karena ahli waris dari keluarga Notaris yang meninggal dunia masih menyimpan protokol Notaris dan belum menyerahkan protokol Notaris tersebut kepada Notaris lain sebagai pemegang protokol Notaris.

Kegiatan operasional kantor yang sedang berjalan akan berhenti seketika apabila Notaris yang bersangkutan meninggal dunia. Selain permasalahan mengenai protokol Notaris, dengan meninggalnya Notaris akan meninggalkan pula banyak permasalahan, baik itu mengenai urusan kantor, pekerjaan kantor dengan sesama Notaris, pekerjaan dengan developer, bank maupun masyarakat pada umumnya yang membutuhkan jasa pelayanan dari Notaris tersebut. Seperti yang telah diketahui bahwa tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara para

⁸ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 63 ayat (5).

pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris.⁹ Hal-hal tersebut tidak bisa diselesaikan karena Notarisnya telah meninggal dunia, sedangkan disisi lain hal-hal tersebut menyangkut hak dari para klien kantor sehingga perlu untuk segera dicarikan solusi untuk penyelesaian pekerjaan kantor.

Sehubungan dengan permasalahan-permasalahan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji, meneliti dan membahas permasalahan tersebut dalam bentuk sebuah Tesis yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS TUGAS DAN KEWAJIBAN NOTARIS YANG BELUM TERSELESAIKAN SETELAH MENINGGAL DUNIA”**.

B. Rumusan Masalah

Guna memberikan arah dalam pembahasan masalah maupun untuk mencapai tujuan penelitian, maka akan dilakukan identifikasi terhadap masalah yang perlu diteliti dan dibahas. Perumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab ahli waris dan MPD terhadap protokol Notaris yang belum diserahkan kepada penerima protokol Notaris ?
2. Bagaimana penyelesaian akta Notaris yang belum diselesaikan setelah Notaris yang bersangkutan meninggal dunia?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian haruslah terdapat tujuan penelitian agar penelitian lebih terarah, jelas dan pasti. Tujuan penelitian menunjukkan apa yang hendak dicapai penulis dalam penelitiannya dan menunjukkan nilai dari penelitian tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab ahli waris Notaris dan MPD terhadap protokol Notaris yang belum diserahkan kepada penerima protokol Notaris.

⁹ Supriadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, 2008, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 50.

2. Untuk mengetahui cara-cara penyelesaian pekerjaan kantor Notaris yang tertunda dikarenakan meninggalnya Notaris yang bersangkutan.

D. Manfaat Penelitian

Kajian penelitian tentunya sangat diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut, yaitu bagi penulis, pembaca, masyarakat pada umumnya maupun bagi pengembangan Ilmu pengetahuan. Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian yang disusun ini memiliki kegunaan sebagai berikut :

- a. Dapat mengembangkan ilmu pengetahuan hukum khususnya menyangkut tanggung jawab ahli waris Notaris dan MPD terkait protokol Notaris serta cara penyelesaian pekerjaan-pekerjaan yang tertunda dan belum terselesaikan.
- b. Dapat dipakai sebagai respons terhadap penelitian – penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat mengenai tanggung jawab ahli waris Notaris dan MPD mengenai protokol Notaris yang belum terselesaikan serta untuk mengetahui cara-cara penyelesaian pekerjaan-pekerjaan yang tertunda pada saat Notaris yang bersangkutan meninggal dunia.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik kepada pembaca, Notaris maupun penulis sendiri. Manfaat yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah untuk menciptakan peraturan yang mengatur lebih jauh mengenai protokol Notaris.

2. Manfaat bagi pembaca

Diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya tentang protokol Notaris dan penyelesaian pekerjaan Notaris yang belum terselesaikan.

2. Manfaat bagi Notaris

Diharapkan tidak mengesampingkan sosialisasi mengenai protokol Notaris kepada keluarga, kerabat, karyawan serta kepada masyarakat pada umumnya mengingat arti pentingnya protokol Notaris sebagai arsip negara dan sebagai alat bukti adanya suatu perbuatan hukum.

3. Manfaat bagi penulis sendiri

Diharapkan disamping memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret Surakarta, juga untuk menambah pengetahuan serta wawasan dibidang hukum kenotariatan, yaitu dalam ruang lingkup protokol Notaris.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Notaris

Sebelum berlakunya Undang–Undang Jabatan Notaris sekarang ini, yang ditunjuk oleh Undang–Undang sebagai Pejabat Umum adalah NOTARIS. Berdasarkan bunyi Pasal 1 Peraturan Umum Jabatan Notaris (PJN) stb. 1860 Nomor 3 yang menyatakan :

“Notaris adalah Pejabat Umum yang satu – satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta Notaris, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”.¹⁰

Dengan dicabutnya Peraturan Jabatan Notaris stb 1860 Nomor : 3 tersebut dan berlakunya Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah dirubah dengan Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang dimaksud Pejabat Umum adalah “ NOTARIS “. Hal ini juga terkait dengan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang–Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa :

“Suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang–Undang, dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta dibuat”.¹¹

Pengertian Notaris dalam Pasal 1 ayat 1 Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang–

¹⁰ Ketua Dewan Kehormatan Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT)
www.majalah.depkuham.go.id : 1, 12 Maret 2017, 10.15 WIB.

¹¹ *Kitab Undang–Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), loc.cit, Ps.1868.*

Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menjelaskan sebagai berikut :

“Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Pengertian Notaris menurut Sarman Hadi secara tegas diungkapkan bahwa : ¹²

“Notaris bukanlah pihak dalam akta yang dibuat di hadapannya, karena tidak memihak. Notaris tidak mempunyai pihak, namun dapat memberikan jalan dalam jalur hukum yang berlaku, agar maksud para pihak yang meminta bukti tertulis akan terjadinya hubungan hukum diantara para pihak, dapat dibantu melalui jalan hukum yang benar. Dengan demikian maksud para pihak tercapai sesuai dengan kehendak para pihak, disinilah dituntut pengetahuan hukum yang luas dari seorang Notaris untuk dapat meletakkan hak dan kewajiban para pihak secara proporsional”.

Landasan filosofis dibentuknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Melalui akta yang dibuatnya, Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat yang menggunakan jasa Notaris. Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris dapat menjadi alat bukti otentik dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pihak manapun yang berkepentingan terhadap akta tersebut mengenai kepastian peristiwa atau perbuatan hukum itu dilakukan.

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menjelaskan bahwa Notaris merupakan Pejabat

¹² Koesbiono Sarman Hadi, *Profesi Notaris Dalam Era Globalisasi, Tantangan dan Peluang*, makalah disampaikan pada seminar Nasional *Profesi Notaris Menjelang Tahun 2000*, tanggal 15 Juni 1996, di Yogyakarta.

Umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang – undangan dan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta – akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan Undang – Undang.

Notaris sebagai pejabat umum adalah suatu profesi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk pembuatan alat bukti berupa akta otentik, oleh karena itu prinsip kehati-hatian dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat dan negara harus selalu dijaga sehingga tidak membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap Notaris. Sifat pekerjaan jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang melaksanakan sebagian fungsi publik dari negara, khususnya dalam bidang hukum perdata dan bidang hukum publik yang memiliki karakteristik tersendiri dan dapat menimbulkan resiko tinggi jika prinsip kehati-hatian dan kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat kepada Notaris tidak dilindungi dan diawasi secara berkala dan ketat, utamanya dalam membuat akta otentik yang dijadikan sebagai bukti adanya suatu hak dan kewajiban bagi pembuatnya.

Notaris dalam menjalankan jabatannya juga merupakan suatu profesi karena Notaris melakukan suatu pekerjaan yang tetap dalam bidang tertentu didasarkan suatu keahlian khusus yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan mendapat penghasilan dari pekerjaan tersebut. Suatu pekerjaan yang dijalankan dengan rambu-rambu keahlian dalam menjalankan profesinya disebut profesional. Notaris sebagai profesi dalam menjalankan jabatannya harus profesional dengan ruang lingkup kewenangan yang sudah ditentukan oleh undang-undang dan harus patuh kepada UUJN serta Kode Etik Notaris.

Notaris di dalam menjalankan tugas sebagai pejabat umum merupakan lembaga kepercayaan yang tidak boleh terlepas dari rambu-rambunya yaitu UUJN sebagai bagian dari hukum positif. Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa jabatan Notaris adalah jabatan yang memberikan pelayanan dan

merupakan suatu lembaga kepercayaan yang dapat diandalkan oleh masyarakat untuk urusan tertentu. Hal-hal tersebut antara lain ialah membantu dalam pembuatan akta perjanjian antara para anggota masyarakat, membuat dan atau menyimpan surat wasiat dan lain sebagainya.

Oktavianus Sinaga menyatakan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang memiliki wewenang membuat akta otentik yang diatur dalam Undang-Undang. Namun tidak semua akta otentik menjadi kewenangan seorang Notaris, misalnya akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian.¹³

B. Tugas dan Kewenangan Notaris

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum adalah menjamin adanya suatu kepastian, ketertiban serta perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan didalam masyarakat. Notaris merupakan pejabat umum yang diberikan sebagian kewenangan oleh negara dan setiap tindakannya harus berdasarkan oleh hukum. Jabatan Notaris merupakan jabatan seorang pejabat negara atau pejabat umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam UUJN pejabat umum adalah orang yang menjalankan sebagian fungsi publik dan negara, khususnya dibidang hukum perdata.¹⁴ Hal ini dapat dilihat pada pengertian Notaris yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UUJN yang menyebutkan bahwa Notaris adalah seorang pejabat umum.

Istilah pejabat umum adalah terjemahan dari *openbare ambtenaren* yang terdapat pada Pasal 1 UUJN dan UUJNP, demikian halnya Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek*. Menurut kamus hukum, salah satu arti dari *ambtenaren* adalah pejabat. Dengan demikian *openbare ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan masyarakat. *Openbare ambtenaren* diartikan sebagai pejabat yang diberi tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan masyarakat dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris. Istilah atau kata pejabat diartikan sebagai pegawai

¹³ Oktavianus Sinaga, <http://www.osinaga.wordpress.com>, 12 Maret 2017, 11.15 WIB.

¹⁴ Yudha Pandu, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Jabatan Notaris dan PPAT*, 2009, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, hlm.2.

pemerintah yang memegang jabatan (unsur pimpinan) atau orang yang memegang suatu jabatan.¹⁵ Dengan kata lain “pejabat lebih menunjuk kepada orang yang memangku suatu jabatan”.¹⁶

Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap. Jabatan merupakan suatu subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban. Suatu jabatan dapat berjalan dengan baik apabila jabatan tersebut disandang oleh subjek hukum lainnya yaitu orang. Orang yang diangkat untuk melaksanakan jabatan disebut pejabat. Suatu jabatan tanpa pejabatnya, maka jabatan tersebut tidak dapat berjalan”.¹⁷

Kewenangan bagi para Notaris yang merupakan amanah UUJN dan UUJNP yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f adalah Notaris berwenang membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.

Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.¹⁸

Ketentuan UUJN maupun UUJNP sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 ayat (2), kewenangan Notaris dalam menjalankan kewajibannya meliputi tujuh (7) macam kewenangan yaitu :

¹⁵ Badudu dan Zain, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1994, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.543.

¹⁶ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, 1996, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.28.

¹⁷ Habib Adjie, Op. Cit., hlm.11.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 15 ayat (1).

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (*legaliseren*);
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (*waarmerken*);
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat Akta risalah lelang.¹⁹

Sebagaimana diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa wewenang Notaris adalah bersifat umum (*regel*) dan meliputi empat hal sebagai berikut :

1. Sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnya.
Tidak setiap pejabat umum dapat membuat semua akta artinya seorang pejabat umum hanya dapat membuat akta-akta tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Sepanjang mengenai tempat, di mana akta itu dibuat.
Setiap Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah hukum Kabupaten atau Kota serta mempunyai wilayah jabatan yang meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya. Notaris hanya berwenang menjalankan jabatannya di daerah hukum yang ditentukan, sehingga akta yang dibuat di luar daerah jabatannya adalah tidak sah.
3. Sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.
Notaris tidak berwenang membuat akta otentik sebelum mengucapkan sumpah di hadapan pejabat yang ditunjuk. Demikian juga Notaris tidak boleh membuat akta selama ia cuti atau diberhentikan dari jabatannya.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 15 ayat (2).

4. Sepanjang mengenai orang – orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.

Bahwa Notaris tidak berwenang untuk membuat akta terhadap siapa saja. Notaris dibatasi oleh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 UUDN dan UUDNP yang menegaskan bahwa Notaris tidak diperkenankan untuk membuat akta untuk diri sendiri, istri atau suami, atau keluarga sedarah atau keluarga semenda dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantara kuasa.²⁰

Berkenaan dengan pembuatan akta, Notaris juga berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani oleh para pihak dengan membuat berita acara dan memberikan catatan pada minuta akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan, yang kemudian salinan akta berita acara tersebut disampaikan kepada para pihak.²¹

Notaris dalam menjalankan kewenangannya harus berlandaskan kepada asas-asas pelaksanaan tugas jabatan Notaris yang baik. Dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dikenal asas-asas sebagai berikut :²²

- a. Asas persamaan;
- b. Asas kepercayaan;
- c. Asas kepastian hukum;
- d. Asas kecermatan;
- e. Asas pemberian alasan;
- f. Larangan penyalahgunaan wewenang;
- g. Larangan bertindak sewenang-wenang.

²⁰ <http://www.kalamliano.bizhosting.com/indonesian.html> : 1, 10 Mei 2017, 12.15 WIB.

²¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 51

²² Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesia Administrative law)*, 2002, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm.270.

Asas-asas tersebut sangat penting bagi seorang Notaris agar Notaris dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku. Untuk kepentingan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, ditambah dengan Asas Proposionalitas dan Asas Profesionalitas.²³

Notaris merupakan salah satu bagian dari masyarakat Indonesia, sehingga sesuai dengan asas persamaan maka Notaris tidak boleh membedakan masyarakat satu dengan yang lain dalam memberikan pelayanan baik dilihat dari sosial ekonomi maupun alasan lainnya. Selain itu, berdasarkan asas kepercayaan maka seorang Notaris merupakan pihak yang sangat dipercaya oleh masyarakat yang dalam hal ini adalah para pihak yang menghadap Notaris.

Salah satu bentuk jabatan kepercayaan yaitu dengan melihat Notaris yang mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu tentang akta yang dibuatnya sesuai dengan sumpah atau janji yang telah diucapkan sebelum diangkat sebagai Notaris kecuali undang-undang menentukan lain. Dengan demikian, batasannya hanya undang-undang saja yang dapat memerintahkan Notaris untuk membuka rahasia isi akta dan keterangan ataupun pernyataan yang diketahui Notaris yang berkaitan dengan pembuatan akta yang dimaksud. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN Perubahan yaitu :

“Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain”.²⁴

Sumpah atau janji tersebut mengandung dua hal yang harus dipahami, yaitu :²⁵

²³ Habib Adjie, *loc.cit*, hlm.34.

²⁴ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (1).

²⁵ Habib Adjie, *loc.cit*, hlm.35.

1. Notaris wajib bertanggung jawab kepada Tuhan karena sumpah/janji yang diucapkan berdasarkan agama masing-masing, dengan demikian artinya segala sesuatu yang dilakukan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya akan diminta pertanggungjawabannya dalam bentuk yang dikehendaki Tuhan;
2. Notaris wajib bertanggung jawab kepada negara dan masyarakat, artinya negara telah memberi kepercayaan untuk menjalankan sebagai tugas negara dalam bidang hukum perdata, yaitu dalam pembuatan alat bukti berupa akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, dan kepada masyarakat yang telah percaya bahwa Notaris mampu memformulasikan kehendaknya kedalam bentuk akta Notaris dan percaya bahwa Notaris mampu menyimpan (merahasiakan) segala keterangan atau ucapan yang diberikan dihadapan Notaris.

Berdasarkan asas kepastian hukum, Notaris wajib berpegang kepada aturan-aturan hukum yang berkaitan mengenai akta yang dibuatnya. Hal ini disebabkan apabila seorang Notaris berpedoman kepada aturan hukum yang berlaku maka hal ini dapat memberikan suatu kepastian hukum bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan Notaris. Selanjutnya, sesuai dengan asas kecermatan maka seorang Notaris diwajibkan untuk meneliti seluruh bukti yang diperlihatkan serta mendengarkan pernyataan ataupun keterangan sebagai dasar dalam pembuatan suatu akta. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yang menyebutkan bahwa :

“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib : bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”.

Pelaksanaan asas kecermatan wajib dilakukan dalam pembuatan akta ini dengan :²⁶

1. Melakukan pengenalan terhadap penghadap, berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada Notaris.
2. Menanyakan kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut (tanya-jawab).
3. Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut.

²⁶ Ibid., hlm.37.

4. Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
5. Memenuhi segala teknik administratif pembuatan akta Notaris, seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan dan pemberkasan untuk minuta.
6. Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus berlandaskan pada asas pemberian alasan. Dalam hal ini Notaris harus memiliki alasan serta fakta yang mendukung dalam akta yang dibuatnya, selain itu Notaris harus dapat memberikan pengertian hukum kepada para penghadap terhadap akta yang dibuatnya tersebut. Notaris memiliki batas kewenangan dalam menjalankan tugas jabatannya dan hal ini sesuai dengan Pasal 15 UUJN. Notaris tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan dalam pembuatan akta diluar wewenang yang telah ditentukan oleh UUJN.

Notaris yang menjalankan tugas jabatannya diluar wewenang yang diberikan kepadanya akan mengakibatkan tindakan tersebut dapat disebut sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang tersebut menyebabkan para pihak menderita kerugian maka para pihak dapat meminta pertanggungjawaban Notaris tersebut. Notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris.²⁷ Hal ini sesuai dengan asas larangan bertindak sewenang-wenang.

Notaris wajib mengutamakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban para pihak yang menghadap Notaris.²⁸ Hal ini berdasarkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yaitu Notaris diwajibkan bertindak dengan menjaga kepentingan para pihak. Notaris harus mampu dalam mempertimbangan keinginan para pihak sehingga kepentingan para pihak tersebut tetap terjaga secara proposional yang kemudian dituangkan dalam bentuk akta Notaris. Selain itu, Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN kecuali apabila ada alasan untuk menolaknya. Hal ini sesuai dengan asas profesionalitas, asas ini

²⁷ Ibid., hlm.38.

²⁸ Ibid.

mengutamakan keahlian (keilmuan) Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.²⁹

C. Akta Otentik

Secara etimologi menurut S. J. Fachema Andreae, kata “akta” berasal dari bahasa latin “*acta*” yang berarti “*geschrift*” atau surat.³⁰ Sedangkan Pitlo berpendapat bahwa :

“Akta adalah suatu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat”.³¹

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut “*acte*” atau “akta” dan dalam bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*”. Menurut pendapat umum, mempunyai dua arti yaitu : ³²

1. Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*).
2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau untuk digunakan sebagai perbuatan hukum tertentu yaitu berupa tulisan yang ditunjukkan kepada pembuktian tertentu.

Sedangkan yang dimaksud dengan akta otentik sebagaimana telah diatur oleh Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu :

”Suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana aktanya dibuat”.³³

Pada Pasal 165 *Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 84 dijelaskan pengertian tentang akta yaitu sebagai berikut :

²⁹ Ibid.

³⁰ Suharjono, “*Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*, Varia Peradilan Tahun XI Nomor 123, Desember 1995, hlm. 128.

³¹ Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*, 1978, cetakan pertama, Intermasa, Jakarta, hlm 26.

³² Widhi Yuliawan, 2013, diakses dari: <http://widhiyuliawan.blogspot.com/2013/04/akta-kelahiran.html>, 14 Mei 2017, 12.30 WIB.

³³ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Ps.1868. cet.September 2010, Permata Pers.

“Akta adalah surat yang diperbuat demikian oleh atau dihadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perihal pada akta itu.”³⁴

Definisi surat menurut Sudikno Mertokusumo adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.³⁵ Sudikno Mertokusumo juga memberikan pengertian tentang akta yaitu :

“Surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian”.³⁶

Suatu akta ialah suatu tulisan yang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.³⁷ Dengan demikian maka unsur yang penting untuk suatu akta ialah kesengajaan untuk menciptakan suatu alat bukti tertulis dan penandatanganan tulisan itu. Didalam KUHPerdara ketentuan mengenai akta diatur dalam pasal 1867 sampai dengan pasal 1880. Selain itu Subekti berpendapat mengenai akta sebagai berikut :

“Suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani”.³⁸

Akta yang dibuat oleh Notaris memiliki sifat sebagai akta hukum yang diakui dan memiliki kekuatan pembuktian. Hal ini diutarakan oleh R. Soegondo Notodisoerjo, yaitu :

“Akta Notaris dapat diterima dalam sidang di pengadilan sebagai alat bukti yang mutlak mengenai isinya, walaupun terhadap akta itu masih dapat diadakan penyangkalan dengan bukti sebaliknya oleh para saksi, apabila mereka yang membuktikan tersebut

³⁴ Pasal 165 *Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 84.

³⁵ Sudikno mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 2006, Liberty, Yogyakarta, hlm. 157

³⁶ Ibid, hlm.149.

³⁷ Subekti, *Hukum Pembuktian*, 2005, cetakan kelima belas, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 25

³⁸ Ibid.

dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan dalam akta itu adalah tidak benar.³⁹

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dituangkan dalam bentuk akta Otentik. Akta sebagai surat bukti tertulis yang sengaja diadakan sebagai alat pembuktian mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat modern ini, akta sebagai dokumen tertulis yang dapat memberikan bukti akan peristiwa hukum yang menjadi dasar dari hak atau perikatan.

Dengan demikian suatu akta dapat dikatakan sebagai akta otentik jika memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Akta yang dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum. Artinya berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa Notaris wajib membuat daftar akta dan mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris.
- b. Akta tersebut dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, yaitu bentuknya ditentukan oleh Undang-undang, dalam hal ini ditentukan dalam pasal 38 Undang-Undang Nomor

³⁹ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia* (Suatu Penjelasan), 1993, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.19.

30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu ditempat di mana akta tersebut dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu. Wewenang Notaris meliputi empat hal yaitu :

1. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang harus dibuat itu.
2. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang (-orang) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.
3. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu di buat. Notaris harus berada di tempat akta tersebut dibuat dan pada akhir akta harus disebutkan tempat (kota/kabupaten) pembuatan dan penyelesaian akta, serta yang terakhir menjalankan tugas jabatan diluar tempat kedudukan Notaris dalam wilayah jabatan satu propinsi tidak merupakan suatu keteraturan atau tidak terus menerus.
4. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus dalam keadaan aktif, artinya tidak dalam keadaan cuti atau diberhentikan sementara waktu.⁴⁰

Di samping unsur-unsur dari akta otentik tersebut di atas selanjutnya akta otentik juga harus memenuhi rumusan mengenai sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 BW dan secara materiil mengikat para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 BW) sebagai suatu perjanjian yang harus ditepati oleh para pihak (*pacta sunt servanda*).

Menurut C.A.Kraan akta otentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : ⁴¹

⁴⁰ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, 2008, Refika Aditama, Bandung, hlm. 133

⁴¹ C.A.Kraan, *De Authentieke Akte, Goud Quint BV*, Arnhem, 1984, hlm 143 dan 201 dalam Herlien Budiono, *Akte Notaris Melalui Media Elektronik*, Upgrading Refresing Course Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, 22-25 Januari 2003, hlm. 3-4

- a. Suatu tulisan dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja.
- b. Suatu tulisan sampai dengan ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang.
- c. Ketentuan perundang-undangan yang harus dipenuhi; ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta tulisan, nama dan kedudukan atau jabatan pejabat yang membuatnya c.q. data dimana dapat diketahui mengenai hal-hal tersebut.
- d. Seorang pejabat yang diangkat oleh Negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri (*onafhankelijk-independece*) serta tidak memihak (*onpartijdigheid-impartiality*) dalam menjalankan jabatannya.
- e. Pernyataan dari fakta atau tindakan yang disebutkan oleh pejabat adalah hubungan hukum di dalam bidang hukum privat.

Akta Otentik dari jenis atau golongannya dapat dibagi menjadi dua jenis atau golongannya yaitu :⁴²

- a. Akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris, yang biasa disebut dengan istilah akta *relaas* atau Berita Acara;
- b. Akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) Notaris, biasa disebut dengan istilah akta Pihak atau akta *Partij*.

Akta-akta tersebut dibuat atas dasar permintaan para pihak atau penghadap, tanpa adanya permintaan para pihak, sudah tentu akta tersebut tidak akan dibuat oleh Notaris. Dalam akta *Relaas* ini Notaris menulis dan mencatatkan semua hal yang dilihat atau didengar sendiri secara langsung oleh Notaris yang dilakukan oleh para pihak.⁴³ Akta Pihak (*partij*) adalah akta yang dibuat dihadapan Notaris atas permintaan para pihak, Notaris berkewajiban untuk mendengarkan pernyataan atau keterangan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan sendiri oleh para pihak dihadapan Notaris. Pernyataan atau

⁴² Habib Adjie, *Loc. Cit.*, hlm. 45

⁴³ G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hlm.15

keterangan para pihak tersebut oleh Notaris dituangkan ke dalam akta Notaris.⁴⁴

Selain itu seorang Notaris juga berkewajiban dalam pembacaan akta dihadapan para penghadap dan saksi. Menurut Tan Thong Kie ada manfaat pembacaan akta, yaitu :⁴⁵

- a. Pada saat terakhir dalam proses meresmikan (*verlijden*) akta, Notaris masih diberi kesempatan memperbaiki kesalahan-kesalahannya sendiri yang sebelumnya tidak terlihat. Sewaktu-waktu ditemukan kesalahan-kesalahan fatal atau yang memalukan atau juga disebutkan “pembacaan adalah kemungkinan terakhir bagi Notaris untuk memeriksa.
- b. Para penghadap diberi kesempatan untuk bertanya apa yang kurang jelas bagi mereka.
- c. Untuk memberi kesempatan kepada Notaris dan para penghadap pada detik-detik terakhir sebelum akta selesai diresmikan dengan tanda tangan mereka, para saksi-saksi, dan Notaris, mengadakan pemikiran ulang, bertanya, dan jika perlu mengubah bunyi akta.

Akta otentik mempunyai arti yang lebih penting daripada sebagai alat bukti, bila terjadi sengketa maka akta otentik dapat digunakan sebagai pedoman bagi para pihak yang bersengketa. Menurut Pasal 1870 KUH Perdata, suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.⁴⁶ Akta otentik merupakan suatu bukti yang sempurna, dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Ia merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna.

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan penuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa kata otentik

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba Serbi Praktek Notaris*, 1994, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm. 507

⁴⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ps.1870. cet.September 2010, Permata Pers.*

makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa.

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris benar-benar telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak yaitu dengan cara membacakan sehingga menjadi jelas isi akta Notaris. Dengan demikian para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi akta Notaris yang akan ditandatangani.

Akta Notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian sebagai berikut :⁴⁷

1. Lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*)

Kekuatan lahiriah akta Notaris merupakan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik. Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta Notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan serta adanya awal akta (mulai dari judul) sampai dengan akhir akta.

2. Formal (*Formale Bewijskracht*)

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta benar dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh pihakpihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur

⁴⁷ Habib Adjie, *Loc.Cit*, hlm. 72.

yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta. Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada akta pihak).

Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan, dan didengar oleh Notaris. Selain itu juga harus dapat membuktikan ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan dihadapan Notaris, dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak saksi, dan Notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan demikian, pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari Akta Notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.

3. Materiil (*Materiele Bewijskracht*)

Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang disebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya. Keterangan atau pernyataan yang dituangkan/dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan para pihak yang diberikan/disampaikan di hadapan Notaris dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang

kemudian dituangkan/dimuat dalam akta berlaku sebagai yang benar atau setiap orang yang datang menghadap Notaris yang kemudian keterangannya dituangkan/ dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian.

Jika ternyata pernyataan/keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggungjawab para pihak sendiri. Dengan demikian Isi akta Notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka.

Akta memiliki 2 (dua) fungsi penting, yaitu fungsi formil (*formalitas causa*) dan fungsi alat bukti (*probationis causa*). Fungsi formil (*formalitas causa*) berarti bahwa untuk lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum haruslah dibuat suatu akta. Fungsi alat bukti (*probationis causa*) akta itu dibuat semula dengan sengaja untuk pembuktian dikemudian hari, sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnya perjanjian, tetapi agar dapat digunakan sebagai alat bukti dikemudian hari.⁴⁸

Akta otentik mempunyai tiga macam pembuktian seperti yang diutarakan Retnowulan Dan Oeripkartawinata, yaitu :⁴⁹

1. Kekuatan pembuktian formil. Membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.
2. Kekuatan pembuktian materiil. Membuktikan antara para pihak, bahwa benar-benar peristiwa tersebut dala akta itu telah terjadi.
3. Kekuatan mengikat. Membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akta yang bersangkutan telah datang menghadap kepada pegawai umum tadi dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

Akta Notaris yang dibuat sesuai kehendak para pihak yang berkepentingan guna memastikan atau menjamin hak dan kewajiban para

⁴⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, 1999, Liberty, Yogyakarta, hlm.121.

⁴⁹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, 1997, cetakan kedelapan, Mandar maju, Bandung, h.49.

pihak, kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum para pihak. Akta Notaris pada hakekatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Pejabat umum (Notaris). Notaris berkewajiban untuk memasukkan dalam akta tentang apa yang sungguh-sungguh telah dimengerti sesuai dengan kehendak para pihak dan membacakan kepada para pihak tentang isi dari akta tersebut pernyataan atau keterangan para pihak tersebut oleh Notaris dituangkan dalam akta Notaris.⁵⁰

Akta Notaris pada umumnya merupakan perjanjian para pihak untuk melakukan sesuatu sebagaimana disepakati oleh para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Hukum Perjanjian bersifat terbuka dan dapat dikatakan mempunyai suatu asas kebebasan berkontrak, artinya kebebasan yang diberikan seluas-luasnya kepada siapapun juga untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Para pihak boleh membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari Pasal-Pasal dalam hukum perjanjian, sedangkan Pasal-Pasal dari hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap, yang berarti Pasal-Pasal tersebut dapat dikesampingkan manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat suatu perjanjian.

Dalam hal memuat suatu perjanjian, secara tegas dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata yang menyatakan :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.⁵¹

Pasal ini mengisyaratkan adanya asas kebebasan berkontrak, akan tetapi kebebasan ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus menaati hukum yang sifatnya memaksa. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat

⁵⁰ Habib Adjie, *op.cit*, hlm. 24.

⁵¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Ps.1338. cet. September 2010, Permata Pers.

kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Suatu perjanjian tidak diperbolehkan membawa kerugian kepada pihak ketiga.

Berpedoman pada ketentuan Pasal 1338 KUHPdata tersebut, maka perjanjian apa saja yang dibuat menurut persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum untuk mengikat para pihak yang telah mengadakannya. Sebenarnya yang dimaksud dengan Pasal tersebut tidak lain adalah menyatakan bahwa orang bebas membuat segala bentuk perjanjian yang disukainya, asal tidak melanggar ketentuan dari Pasal 1320 KUHPdata.

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, artinya adalah bahwa setiap orang bebas untuk membuat suatu perjanjian, dan kebebasan ini mengenai isi maupun bentuk-bentuk perjanjian dan apa yang mereka perjanjikan atau sepakati bersama merupakan Undang-undang bagi mereka yang membuat dan karenanya harus dipatuhi dan ditaatinya. Apabila ada yang melanggar perjanjian yang mereka buat, maka dianggap sama dengan melanggar Undang-undang yang mempunyai akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Perjanjian ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa, sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus mentaati hukum yang sifatnya memaksa tersebut.

Dengan demikian bahwa akta Notaris mengikat para pihak yang tertuang dalam akta tersebut untuk melaksanakan hal-hal yang telah disepakati. Jika terjadi salah satu pihak tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana disepakati, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut prestasi. Dalam hal ini akta Notaris dapat dijadikan sebagai pembuktian terhadap tidak terlaksananya prestasi tersebut. Akta otentik merupakan bukti yang mengikat yang berarti kebenaran dari hal-hal yang tertulis dalam akta

tersebut harus diakui hakim, yaitu akta tersebut dianggap sebagai benar selama kebenarannya itu tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya.

Seseorang yang tidak melaksanakan perjanjian baik karena kesengajaan atau karena kelalaian tidak dengan sendirinya dikatakan telah melakukan wanprestasi atau cidera janji, sehingga terhadapnya dapat dimintakan ganti rugi. Berdasarkan sistem hukum di Indonesia dan umumnya di negara-negara *Civil Law*, bila salah satu tidak memenuhi prestasi, maka haruslah pihak lain dalam kontrak tersebut terlebih dahulu mengajukan peringatan yang dikenal dengan istilah “somasi”. Dalam somasi ini ditentukan jangka waktu pemenuhan prestasi. Jika waktu ini terlewati dan ternyata prestasi tidak juga dipenuhi atau tidak sempurna dipenuhi maka barulah dapat dikatakan pihak tersebut telah melakukan wanprestasi dan karenanya dapat dituntut ke pengadilan. Jika somasi ini tidak diberikan terlebih dahulu, dan langsung saja diajukan gugatan ke pengadilan, maka gugatan seperti ini disebut dengan gugatan *premature* (belum waktunya untuk diajukan). Keharusan adanya somasi ini tidak dikenal dalam negara-negara yang menganut sistem hukum *anglo saxon*. Bila terjadi wanprestasi, maka lainnya dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada pihak yang melakukan wanprestasi.

Ketentuan Pasal 1868 BW (*Burgerlijk Wetboek*) secara tegas disebutkan bahwa :

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalamnya oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat di mana akta dibuatnya”.⁵² Berdasarkan ketentuan Pasal 1868 BW tersebut maka suatu akta dinyatakan sebagai akta otentik apabila memenuhi unsur – unsur yang bersifat kumulatif sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1868 BW yaitu antara lain :

1. Bentuk akta ditentukan oleh undang – undang.
2. Akta dibuat oleh dan di hadapan pegawai – pegawai umum yang berkuasa.
3. Akta itu dibuat di tempat di mana akta dibuat”.

⁵² *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ps.1868. cet.September 2010, Permata Pers.*

Suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.⁵³

Akibat hukum dari akta Notaris tersebut tetap melekat sepanjang akta Notaris tersebut tidak diubah atau dibatalkan oleh para pihak yang mengikatkan diri didalam akta Notaris tersebut. Artinya, walaupun Notaris yang membuat akta tersebut telah berakhir masa jabatannya, akta Notaris yang dibuat tetap berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sedangkan bagi Notaris, hanya bertanggungjawab terhadap formil akta yang dibuatnya, bukan terhadap isi dari akta tersebut. Oleh karenanya Notaris dalam membuat akta harus memenuhi standar prosedur, sehingga pertanggungjawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya harus melekat seumur hidup pada diri Notaris. Selain itu dalam hal Notaris sebagai pejabat maka akibat hukum terhadap Notaris yang telah berakhir masa jabatannya didasarkan pada teori tanggung jawab jabatan, bahwa seseorang harus bertanggung jawab terhadap kesalahannya yang dilakukan terkait kewenangannya. Notaris harus bertanggung jawab atas kesalahannya ketika Notaris tersebut masih menjabat, ketika orang tersebut sudah tidak menjabat lagi, maka Notaris tersebut tidak harus bertanggung jawab terkait jabatannya yang pernah diembannya.

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan penuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Akta otentik penting bagi para pihak yang membutuhkan alat pembuktian untuk suatu kepentingan pribadi maupun untuk kepentingan usaha seperti akta mendirikan PT, Firma, perkumpulan perdata dan lain-lain.⁵⁴ Fungsi akta otentik dalam hal pembuktian tentunya diharapkan dapat menjelaskan secara lengkap dalam proses pembuktian dipersidangan, karena didalam proses peradilan berdasarkan hukum acara pidana terdapat proses pembuktian.

⁵³ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ps.1870. cet. September 2010, Permata Pers.*

⁵⁴ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, 1993, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.9.

D. Minuta dan Salinan Akta Notaris

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang dimaksud dengan asli akta atau Minuta akta adalah :

“Asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari protokol Notaris.

Akta Notaris ada yang dibuat dalam bentuk minuta dapat dibuatkan salinannya yang sama bunyinya atau isinya sesuai dengan permintaan para penghadap, orang yang memperoleh hak atau para ahli warisnya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.⁵⁵

Dalam suatu asli akta atau minuta akta Notaris tersebut terdapat unsur-unsur yang penting yaitu :

a. Asli Tanda tangan

Dalam asli akta atau minuta akta Notaris tercantum paraf dan tanda tangan para pihak yang berkepentingan dalam akta tersebut, para saksi, saksi (-saksi) pengenal jika ada, penerjemah jika ada, dan Notaris sendiri. Yang dimaksud dengan paraf dalam pengertian umum adalah tanda tangan yang disederhanakan atau singkatan dari tanda tangan.⁵⁶

Definisi tanda tangan oleh Tan Thong Kie dirumuskan sebagai berikut :

“Tanda tangan adalah suatu pernyataan kemauan pembuat tanda tangan (penandatanganan), bahwa ia dengan membubuhkan tanda tangannya dibawah suatu tulisan menghendaki agar tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri.”⁵⁷

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris , Pasal 54 ayat (1) menegaskan Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi akta, Grosse akta, Salinan akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

⁵⁶ Tan Thong Kie, *loc.cit.*, hlm. 513.

⁵⁷ Tan Thong Kie, *loc.cit.*, hlm. 473.

Pengertian tanda tangan secara umum adalah tanda tangan yang dapat didefinisikan sebagai suatu susunan (huruf) tanda berupa tulisan dari yang menandatangani dengan mana orang yang membuat pernyataan tersebut dapat diindividualisasikan.⁵⁸

Pembubuhan paraf dan atau tanda tangan dan/atau cap jempol tangan para pihak atau para penghadap pada akta Notaris dimaksudkan sebagai bukti nyata dan bukti otentik bahwa :⁵⁹

- a) Notaris telah membacakan dan menjelaskan/menerangkan kepada para pihak (penghadap) hal-hal yang dimuat dalam akta Notaris dihadapan para saksi;
- b) Hal-hal yang dimuat dalam akta Notaris merupakan kehendak dan keinginan (para) penghadap/pihak yang tidak ada paksaan dan dilakukan dengan sadar dan sukarela;
- c) (Para) pihak atau penghadap telah memahami, mengerti, mengetahui, sepakat dan menyetujui hal-hal yang dimuat dalam akta Notaris yang ditandatangani;
- d) Segala hal dan atau surat atau dokumen yang menjadi alas hak dalam pembuatan akta Notaris yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris adalah asli, sah dan benar;
- e) (Para) penghadap telah benar-benar hadir, atau berhadapan, atau menghadap di hadapan Notaris dan para saksi;

Akta Notaris yang ditandatangani tersebut merupakan peraturan dan ketentuan yang mengikat (para) penghadap atau pihak dan merupakan alat bukti otentik bagi (para) penghadap/pihak lain yang terkait berkepentingan atas akta Notaris tersebut. Akta Notaris sebagai alat bukti otentik dibuat oleh atau dihadapan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik di dalam suatu daerah yang menjadi kewenangan Notaris dalam bentuk

⁵⁸ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, 2007, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 220

⁵⁹ Michael Josef Widiyatmoko, Sunarto, Wahyu Nugroho, *Teknik Pembuatan Akta Otentik (Akta Notaris dan Akta PPAT)*, 2012, Buku Pertama, Surakarta, hlm. 173-174.

dan tata cara sesuai dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. *Renvooi*

Menurut pendapat R. Soegondo Notodisoerjo, yang dimaksud dengan *Renvooi* adalah ⁶⁰ : penunjukan kepada catatan disisi akta tentang tambahan, coretan dan penggantian yang disahkan.

b. Sidik Jari

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, ketentuan tentang sidik jari memang baru diterapkan dalam praktek Notaris saat ini, ketentuan tentang sidik jari tidak diatur atau diwajibkan oleh Undang Undang sebelumnya yaitu Undang Undang nomor 30 tahun 2004 kepada Notaris. Pengertian sidik jari dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah : ⁶¹

- a. Penyelidikan jari untuk mengetahui dan membedakan orang (dengan meneliti garis-garis rekaman ujung jari)
- b. Rekam jari/cap jempol.

Selanjutnya dalam pengertian umum sidik jari adalah ⁶² :

Hasil reproduksi tapak jari baik yang sengaja diambil, dicapkan dengan tinta, maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah tersentuh kulit telapak tangan atau kaki. Kulit telapak adalah kulit pada bagian telapak tangan mulai dari pergelangan sampai ke semua ujung jari, dan kulit bagian dari telapak kaki mulai dari tumit sampai ke ujung jari yang mana pada daerah tersebut terdapat garis halus menonjol yang keluar satu sama lain yang dipisahkan oleh celah atau alur yang membentuk struktur tertentu.

Ketentuan melekatkan sidik jari penghadap diatur dalam pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang

⁶⁰ R. Soegondo Notodisoerjo, *Loc.Cit*, hlm. 175.

⁶¹ W.C.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1975, Balai Pustaka, Jakarta hlm. 943.

⁶² Widyatmoko, “*Analisis Kritis membedah ketentuan Undang-Undang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN)*”, dengan tema seminar Analisis Kritis Terhadap perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 16 Januari 2014, hlm. 22.

berbunyi dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta.

Setelah asli akta atau minuta akta dibuat oleh Notaris, maka Notaris berkewajiban secara langsung mengeluarkan salinan akta. Kewenangan Notaris untuk membuat salinan akta diatur berdasarkan ketentuan dalam pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu : mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta.⁶³

Menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang dimaksud dengan salinan akta adalah : “Salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan Akta tercantum frasa” diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya”.⁶⁴ Salinan kata dapat dikeluarkan jika ada akta dalam minutanya (In Minuta) yang sama bunyinya.

Dari ketentuan ini dapat kita fahami secara jelas bahwa salinan, yang berdasar ketentuan yang tercantum dalam pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, diformulasikan sebagai salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya” adalah mempunyai kekuatan pembuktian yang sama seperti asli aktanya. Suatu tembusan surat yang dibuat dengan kertas karbon berlaku sebagai aslinya,

⁶³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris , Pasal 16 ayat (1) huruf d.

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris , Pasal 1 ayat (9).

karena tembusan itu sama dengan surat yang ditulis pada halaman pertama dengan mana pensil atau pena itu langsung berhubungan.⁶⁵

Pada salinan akta yang dikeluarkan oleh Notaris “hanya” dibubuhi tanda tangan, bermaterai cukup dan dibubuhi cap jabatan Notaris dari Notaris yang mengeluarkan salinan akta dimana minuta aktanya dibuat dan disimpan oleh Notaris tersebut. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 16 ayat (1) huruf d dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyebutkan bahwa Salinan akta hanya dapat dikeluarkan oleh Notaris, apabila Notaris tersebut menyimpan minuta akta dan hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan salinan akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

E. Protokol Notaris

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta otentik menentukan secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terkait, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindarkan dari sengketa. Apabila sengketa tidak dapat dihindari, dalam penyelesaian sengketa tersebut akta otentik merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh yang memberikan sumbangan nyata bagi penyelesaian sengketa.

Pasal 1 butir 13 UUDN dan UUDNP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan

⁶⁵ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 49.

ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁶ Penyimpanan dan pemeliharaan Protokol Notaris tersebut terus berlangsung walaupun Notaris yang bersangkutan telah pensiun atau bahkan sudah meninggal dunia. Protokol Notaris tersebut diserahkan kepada Notaris lain sebagai Pemegang Protokol Notaris. Pentingnya Akta Notaris sebagai Akta Otentik dan Protokol Notaris digambarkan dalam bagian Penjelasan Umum UUJN dan UUJNP sebagai berikut : “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya”. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan.

Sebagaimana tercantum dalam kutipan di atas, Akta Notaris dan Protokol Notaris bukan hanya menjaga kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan semata-mata, melainkan sekaligus juga bagi “masyarakat secara keseluruhan”. Pentingnya kedudukan Protokol Notaris sebagai arsip negara dapat juga dilihat dari salah satu kewajiban Notaris, yaitu kewajiban untuk “mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan (Pasal 16 ayat (1) huruf k UUJN dan UUJNP). Mengenai pemakaian lambang negara pada cap/stempel Notaris oleh Tan Thong Kie dikatakan bahwa :

“... para Notaris ... diperkenankan memakainya, namun hanya dalam cap (alat untuk membuat tanda) Notaris. Dengan kata lain, lambang itu tidak melekat pada nama seorang Notaris, tetapi hanya pada cap dan capnya harus diterakan pada pekerjaannya

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 butir 13.

sebagai Notaris, yaitu di sebelah tandatangan Notaris, di bawah suatu salinan akta autentik atau grosse yang dikeluarkannya”.⁶⁷

Sesuai dengan ketentuan bahwa Notaris adalah penyimpan dan pemelihara Protokol Notaris sebagai arsip negara, maka diadakan ketentuan khusus dalam pemanggilan Notaris berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang disimpannya.⁶⁸ Perlakuan khusus dalam pemanggilan Notaris pada hakikatnya tidaklah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, sebab Notaris tetap mempunyai kedudukan dalam hukum yang sama dengan setiap warga negara lainnya, perlakuan khusus dalam pemanggilan Notaris hanyalah soal prosedur pemanggilan semata-mata berkaitan dengan Akta Notaris dan Protokol Notaris yang merupakan arsip negara.

Pasal 62 UUDN mengatur mengenai alasan-alasan apa yang mendasari dilakukannya penyerahan Protokol Notaris. Selengkapnya Pasal 62 UUDN menyebutkan bahwa penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris :⁶⁹

1. Meninggal dunia.
2. Telah berakhir masa jabatannya.
3. Minta sendiri.
4. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun.
5. Diangkat menjadi pejabat Negara.
6. Pindah wilayah jabatan.
7. Diberhentikan sementara.
8. Diberhentikan dengan tidak hormat.⁷⁰

⁶⁷ Tan Thong Kie, *Loc.Cit.*, hlm. 179.

⁶⁸ Muriel Cattleya Maramis, *Tata Cara Pemanggilan Notaris untuk Kepentingan Proses Peradilan Pidana Berkaitan dengan Akta yang Dibuatnya*. Lex Crimen Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2012, hlm.13.

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 62.

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 62.

Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 62 UUJN, disebutkan bahwa Protokol Notaris terdiri atas :

1. Minuta Akta

Minuta akta adalah asli akta Notaris, dimana di dalam minuta akta ini terdiri dari (dilekatkan) data-data diri para penghadap dan dokumen lain yang diperlukan untuk pembuatan akta tersebut. Setiap bulannya minuta akta harus selalu dijilid menjadi satu buku yang memuat tidak lebih dari 50 akta. Pada sampul setiap buku tersebut dicatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya.

2. Buku Daftar Akta / Repertorium

Dalam Repertorium ini, setiap hari Notaris mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapannya baik dalam bentuk minuta akta maupun Originali.

Repertorium juga berguna untuk menunjukkan eksistensi akta yang dibuat oleh Notaris. Repertorium terdiri dari :

1. Nomor urut dari akta yang dibuat oleh Notaris sejak diangkat hingga pensiun.
2. Nomor bulanan, menunjukkan berapa banyak akta yang dibuat dalam 1 (satu) bulan.
3. Tanggal akta.
4. Sifat akta yang menunjukkan akta apa yang dibuat oleh Notaris.
5. Nama dan identitas para pihak.

3. Buku daftar akta di bawah tangan yang terdiri dari :

1. Akta/surat di bawah tangan yang ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan di hadapan Notaris yang disebut dengan legalisasi. Akta/surat di bawah tangan yang disahkan itu adalah akta/surat yang dibuat sendiri oleh para pihak, akan tetapi pembubuhan tanda tangan para pihak dilakukan di hadapan Notaris. Maksudnya adalah agar dapat dipastikan bahwa orang yang menandatangani akta/surat tersebut benar-

benar adalah orang yang bersangkutan, karena mereka menandatangani di hadapan Notaris. Oleh karena itu isi dari akta/surat di bawah tangan itu lebih kuat mengikat para pihak karena Notaris menjamin bahwa para pihak benar menandatangani di hadapan Notaris.

2. Akta/surat di bawah tangan yang didaftarkan atau dicatatkan (*waarmerking*). Akta/surat di bawah tangan yang sudah ditandatangani oleh para pihak kemudian dibawa ke Notaris untuk dicatat dalam buku daftar surat di bawah tangan dan kegunaannya hanya untuk mencatat surat tersebut, sehingga jika surat di bawah tangan yang didaftar tersebut hilang maka copian atau salinan surat tersebut dapat dilihat di kantor Notaris. Dalam pengajuan pencatatan akta/surat tersebut tidak harus dilakukan oleh semua pihak, akan tetapi dapat dilakukan oleh 1 (satu) pihak saja.

4. Buku daftar nama penghadap atau klapper

Notaris wajib membuat daftar Klapper yang disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan, dimana dicantumkan nama semua orang/pihak yang menghadap, sifat dan nomor akta.

Buku klapper ini berguna sebagai buku kendali dalam mencari minuta.

5. Buku daftar protes

Cara penomoran daftar protes dimulai dengan nomor urut 01 dan terus berlanjut selama masa bhakti jabatannya selaku Notaris dan nomor urut ini merupakan nomor urut daftar protes, sedangkan nomor aktanya mengikuti nomor urut bulanan yang tercantum dalam daftar akta. Setiap bulan Notaris menyampaikan Daftar Akta Protes dan apabila tidak ada, maka tetap wajib dibuat dengan tulisan “NIHIL”.

6. Buku daftar wasiat.

Notaris wajib mencatat akta-akta wasiat yang dibuatnya dalam Buku Daftar Wasiat. Selain itu, paling lambat pada tanggal 5 setiap bulannya, Notaris wajib membuat dan melaporkan daftar wasiat atas wasiat-wasiat yang dibuat pada bulan sebelumnya dan harus dilaporkan ke Daftar Pusat Wasiat. Apabila tidak ada wasiat yang dibuat, maka Buku Daftar Wasiat tetap harus dibuat dan dilaporkan dengan tulisan “NIHIL”.

7. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti halnya Buku daftar koperasi dimana buku daftar koperasi mencatat kapan Pendirian Koperasinya dan dengan akta nomor dan tanggal berapa, Perubahan Anggaran Dasar atau Perubahan susunan pengurus.

Di samping Buku Daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris yang telah disebutkan di atas, seorang Notaris yang baik seyogyanya mengadministrasikan dan membuat tata kearsipan terhadap hal-hal sebagai berikut :⁷¹

1. Buku Daftar Akta Harian ;
2. Map khusus yang berisikan minuta-minuta akta sebelum dijilid menjadi Buku setiap bulannya
3. File Arsip Warkah Akta ;
4. File Arsip yang berisikan copy Surat Di Bawah Tangan Yang Disahkan ;
5. File Arsip yang berisikan copy Surat Di Bawah Tangan Yang Dibukukan ;
6. File Arsip yang berisikan copy Daftar Protes ;
7. File Arsip *Copy Collatione* (yaitu copy dari surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan) ;

⁷¹ <http://hasyimsoska.blogspot.com/2011/11/protokol-Notaris-dan-ppat.html>, 10 Mei 2017, 10.10 WIB.

8. File Arsip Laporan Bulanan Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang dilampiri dengan tanda terima dari MPD ;
9. File Arsip yang berisikan Laporan Wasiat kepada Direktur Perdata cq Balai Harta Peninggalan Sub Direktorat Wasiat;
10. File Arsip yang berisikan tanda terima salinan Akta;
11. Buku Surat Masuk dan Surat Keluar Notaris ;
12. File Arsip Surat Masuk Notaris ;
13. File Arsip copy Surat Keluar Notaris ;
14. Buku Daftar tentang Badan Hukum Sosial dan Badan Usaha yang bukan badan hukum yang dibuat di kantornya.

Akta otentik menentukan secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terkait dengan akta tersebut, memberikan kepastian hukum dan dengan adanya akta otentik tersebut diharapkan dapat menghindari permasalahan atau sengketa diantara para pihak kelak dikemudian hari. Akan tetapi apabila timbul permasalahan diantara para pihak yang kemudian menimbulkan sengketa tidak dapat dihindari maka dalam proses penyelesaiannya dapat dibantu dengan adanya akta otentik tersebut dimana akta otentik tersebut merupakan alat bukti tertulis terkuat dan penuh yang mampu memberikan peran nyata dalam penyelesaian permasalahan sengketa diantara para pihak.

F. Daluarsa Akta (*Verjaring*)

Daluarsa yang dimaksud dalam KUH Perdata Pasal 1946 ialah : “suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang”.⁷² Dimana seseorang melakukan sebuah perjanjian yang tertera pada kontrak yang telah disepakati bersama dalam “hitam di atas putih”. Yang sebagaimana apa yang tertulis di dalam surat perjanjian atau kontrak tersebut harus dilakukan sesuai

⁷² *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Pasal. 1946. cet. September 2010, Permata Pers.*

dengan perjanjian yang dibuat. Seseorang tidak boleh melepaskan daluwarsa sebelum tiba waktunya, tetapi boleh melepaskan suatu daluwarsa yang telah diperolehnya. Pelepasan daluwarsa dapat dilakukan secara tegas atau secara diam-diam. Pelepasan secara diam-diam disimpulkan dari suatu perbuatan yang menimbulkan dugaan bahwa seseorang tidak berkehendak untuk menggunakan suatu hak yang telah diperolehnya.⁷³

Selanjutnya Pasal 1967 KUH Perdata menyebutkan bahwa :

Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikadnya yang buruk.⁷⁴

Untuk memperoleh hak milik atas sesuatu dengan upaya daluwarsa, seseorang harus bertindak sebagai pemilik sesuatu itu dengan menguasainya secara terus-menerus dan tidak terputus-putus, secara terbuka di hadapan umum dan secara tegas. Perbuatan memaksa, perbuatan sewenang-wenang, atau perbuatan membiarkan begitu saja tidaklah menimbulkan suatu *bezit* yang dapat membuahkan daluwarsa. Seseorang yang sekarang menguasai suatu barang, yang membuktikan bahwa ia menguasai sejak dulu, dianggap juga telah menguasainya selama selang waktu antara dulu dan sekarang, tanpa mengurangi pembuktian hal yang sebaliknya. Untuk memenuhi waktu yang diperlukan untuk daluwarsa, dapatlah seseorang menambah waktu selama ia berkuasa dengan waktu selama berkuasanya orang yang lebih dahulu berkuasa dari siapa ia telah memperoleh barangnya, tak peduli bagaimana ia menggantikan orang itu, baik dengan alas hak umum maupun dengan alas hak khusus, baik dengan cuma-cuma maupun atas beban.

Pelepasan Daluarsa dibagi menjadi 2, yaitu :

1. Dilakukan secara Tegas

Seseorang yang melakukan perikatan tidak diperkenankan melepaskan Daluarsa sebelum tiba waktunya, apabila ia telah memenuhi

⁷³ A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa*, 1986, PT Intermasa, Jakarta, hlm, 162.

⁷⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Op.Cit, Pasal.1967.*

syarat-syarat yang ditentukan dan waktu yang telah ditentukan pula, maka ia berhak melepaskan Daluarsanya.

2. Dilakukan secara Diam-diam

Pelepasan yang dilakukan secara diam-diam ini terjadi karena si pemegang Daluarsa tidak ingin mempergunakan haknya dalam sebuah perikatan.

Ada dua macam Daluarsa atau *Verjaring* :

a. *Acquisitieve Verjaring*

Adalah lampau waktu yang menimbulkan hak. Syarat adanya kedaluarsa ini harus ada itikad baik dari pihak yang menguasai benda tersebut.

Pasal 1963 KUH Perdata menjelaskan :

“Siapa yang dengan itikad baik, dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan daluarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun. Siapa yang dengan itikad baik menguasainya selama tiga puluh tahun, memperoleh hak milik dengan tidak dapat dipaksa untuk mempertunjukkan alas haknya”.⁷⁵

Seorang *bezitter* (yang berkedudukan berkuasa) yang jujur atas suatu benda yng tidak bergerak lama kelamaan dapat memperoleh hak milik atas benda tersebut. Apabila ia bisa menunjukkan suatu *title* yang sah, maka dengan daluarsa 20 (dua puluh) tahun sejak mulai menguasai benda tersebut. Dalam hal batas waktunya adalah 30 tahun dipergunakan untuk daluarsa tanpa ada alas hak yang sah. Selama waktu itu tidak ada gangguan dari pihak ketiga, maka demi hukum, hak atas kebendaan itu menjadi miliknya dan tanpa dipertanyakannya alas hukum tersebut.

⁷⁵ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ps.1963. cet.September2010, Permata Pers.*

b. *Extinctieve Verjaring*

Adalah lampau waktu lampau yang melenyapkan atau membebaskan terhadap tagihan atau kewajibannya dan biasanya untuk daluarsa dalam hal *extinctieve Verjaring* ini dalam bentuk tagihan keuangan dengan maksimal jangka waktu 30 tahun di mana apabila telah lewat masa 30 tahun tersebut maka hutang tersebut dihapuskan dan yang berhutang dibebaskan dari pembayaran. Ini berarti, bila seseorang digugat untuk membayar suatu hutang yang sudah lebih dari tiga puluh tahun lamanya, ia dapat menolak gugatan itu dengan hanya mengajukan bahwa ia selama tiga puluh tahun belum pernah menerima tuntutan atau gugatan itu.⁷⁶

Tujuan Lembaga Daluarsa :

- Untuk melindungi kepentingan masyarakat
- Untuk melindungi si berutang dengan jalan mengamankannya terhadap tututan yang sudah lampau.

Pembuktian dan daluwarsa diatur dalam buku keempat KUH Perdata. Bukti tulisan didalam perkara perdata merupakan bukti yang utama, karena dalam hubungan keperdataan seringkali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai apabila timbul suatu perselisihan dan bukti yang disediakan tadi lazimnya berupa tulisan. Akta merupakan salah satu alat yaitu suatu tulisan yang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani. Dengan demikian maka unsur yang penting untuk suatu akta ialah kesengajaan untuk membuat suatu bukti tertulis yaitu dengan penandatanganan akta itu. Syarat penandatanganan dapat dilihat pada Pasal 1874 KUH Perdata.

Daluarsa akta Notaris

Akta Notaris tahun berapapun tidak mengenal Daluarsa. Akta Notaris akan aktif sejak adanya atau terjadinya atau dilakukannya perbuatan hukum

⁷⁶ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta, Intermasa, 1975, Cet.Sembilan, hlm. 186-187.

dengan akta Notaris tersebut. Artinya Daluarsa dalam akta Notaris terkait dengan kebenaran formal, materil dan lahiriah, akta yang dipalsukan atau akta yang berisi keterangan palsu dari para penghadap yang tersebut dalam akta akan tetap aktif selama tidak dibatalkan atau batal demi hukum.

Akta Notaris selain diatur dalam UUN dan UUJNP dalam hal dianggap sebagai arsip negara bisa berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan. Di dalam Undang-Undang tersebut diatur mengenai jangka waktu penyimpanan yang biasa disebut retensi. Arti harafiah dari retensi adalah penahanan. Dalam kearsipan, retensi arsip artinya lama waktu suatu arsip disimpan (ditahan) di file aktif atau file in-aktif sebelum dipindahkan atau dimusnahkan. Kriteria menentukan waktu retensi sebaiknya berdasarkan golongan arsip, yaitu vital, penting, berguna, dan tidak berguna. Waktu retensi arsip baik di file aktif maupun in-aktif hendaklah sesuai dengan kebutuhan. Dengan adanya jadwal retensi arsip maka dapat dilaksanakan seleksi arsip yang akan dipindahkan atau dimusnahkan.

Menurut pasal 1 ayat (22) UU Kearsipan, Jadwal retensi arsip yang selanjutnya disingkat JRA dalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip. Sedangkan Pasal 1 ayat (37) PP No. 28/2012 tentang Pelaksanaan UU Kearsipan, menjelaskan bahwa Retensi arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.

Menurut Pasal 1 angka 22 UU No. 43 Tahun 2009, Jadwal Retensi Arsip (JRA) merupakan daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.

Tabel 1.
Contoh Jadwal Retensi Arsip⁷⁷

Golongan Arsip	Arsip	Umur Arsip		Abadi / Dimusnahkan
		Aktif	In-aktif	
Vital	1. Akte Pendirian Perusahaan	-	-	Abadi
	2. Daftar Saham	-	-	Abadi
	3. Akte Tanah	-	-	Abadi
	4. Surat Keputusan	-	-	Abadi
	5. Dan Seterusnya			
Penting	1. Pertanggung-jawaban Keuangan	5 tahun	25 tahun	Dimusnahkan
	2. Cek Berkas	5 tahun	25 tahun	Dimusnahkan
	3. Surat Perjanjian	Sesuai	Sesuai	Dimusnahkan
	4. Dan Seterusnya	Keperluan	Keperluan	
Berguna	1. Laporan Tahunan	2 tahun	10 tahun	Dimusnahkan
	2. Neraca	2 tahun	10 tahun	Dimusnahkan
	3. Dan Seterusnya			
Tidak Berguna	1. Undangan	1 bulan	-	Dimusnahkan
	2. Pengumuman	1 bulan	-	Dimusnahkan

Berdasarkan ketentuan tersebut, akta autentik termasuk golongan vital, bersifat abadi dan tidak dimusnahkan. pada dasarnya menyimpan minuta akta itu adalah kewajiban Notaris, sehingga Notaris seharusnya menyimpan sendiri Protokol Notaris (yang berisi minuta akta). Hal ini karena Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris (Pasal 1 angka 13 UU Jabatan Notaris). Akta Notaris tahun berapapun tidak mengenal Daluarsa.

G. Teori-Teori Hukum

Teori adalah menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi.⁷⁸ Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Batasan dan sifat hakikat suatu teori adalah :

⁷⁷ Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan, Pasal 1 angka 22.

⁷⁸ J.J.J M. Wuisman, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, 1996, Jilid I UI Press, Jakarta, hlm.203.

“Seperangkat konstruk (konsep), batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar *variabel*, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala itu”.⁷⁹

Suatu permasalahan hukum relevan apabila dikaji teori-teori hukum. Duane R. Munette mengemukakan teori adalah seperangkat proposisi atau keterangan yang saling berhubungan dengan sistem deduksi, yang mengemukakan penjelasan atas suatu masalah.⁸⁰ Brugink mendefinisikan teori adalah proses atau aktivitas dan sebagai produk atau hasil aktivitas itu, dan hasil itu terdiri atas keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan tentang suatu objek.⁸¹ Jan Gijssels dan Mark van Hoccke juga mengemukakan pengertian teori adalah sebuah sistem pernyataan-pernyataan (klaim-klaim), pandangan-pandangan dan pengertian-pengertian yang saling berkaitan secara logikal berkenaan dengan suatu bidang kenyataan, yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga menjadi mungkin untuk menjabarkan (menurunkan) hipotesis-hipotesis yang dapat diuji.⁸² Dari pendapat-pendapat di atas, maka yang dimaksud dengan teori adalah suatu penjelasan yang berupaya untuk menyederhanakan pemahaman mengenai suatu fenomena atau teori juga merupakan simpulan dari rangkaian berbagai fenomena menjadi sebuah penjelasan yang sifatnya umum.⁸³

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk menstrukturisasikan penemuan-penemuan selama penelitian, membuat beberapa pemikiran atas dasar penemuan dan menyajikannya dalam bentuk penjelasan-penjelasan. Teori juga bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi. Untuk itu, teori dalam sebuah penelitian berfungsi sebagai alat dan cara untuk melakukan analisis terhadap suatu peristiwa atau fakta hukum yang

⁷⁹ Fred N. Kerlinger, *Asas-asas Penelitian Behavioral*, 1996, Edisi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, Cetakan Kelima, hlm.14. dalam Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 2012, Cetakan Keenam, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.42.

⁸⁰ H. Salim. HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, 2009, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 9

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*

⁸³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 2010, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 134.

diajukan dalam masalah penelitian. Teori-teori yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini adalah teori tujuan hukum, kepastian hukum, teori kewenangan, teori tanggung jawab, teori kebenaran, teori keadilan dan teori kemanfaatan, sebagai berikut :

1. Teori Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch hukum memiliki tujuan hukum yang berorientasi pada 3 hal yaitu : ⁸⁴

- b) Keadilan
- c) Kemanfaatan
- d) Kepastian Hukum

Pandangan dari Gustav Radbruch ini dikenal juga dengan teori tiga nilai dasar hukum yang merupakan *rechtsidee* /cita hukum yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk konsestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.⁸⁵

Teori Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:⁸⁶

⁸⁴ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, 2011, Griya Media, Salatiga, hlm. 33.

⁸⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, hlm 135.

⁸⁶ Apa itu kepastian hukum, <http://yancearizona.wordpress.com/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>, 15 Mei 2017, 11.30 WIB.

- a) Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah undang-undang.
- b) Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c) Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- d) Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari undang-undang. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan dengan baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Hukum merupakan suatu sistem, yang berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan satu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan erat satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.

2. Teori Keadilan

Bicara tentang keadilan pastinya tidak ada pendefinisian yang dapat dikatakan sama. Konsep keadilan selalu diartikan dengan berbagai definisi dan selalu dilatarbelakangi dari sisi orang yang mendefinisikan. Berangkat dari pemikiran yang menjadi issue para pencari keadilan terhadap problema yang paling sering menjadi diskursus adalah mengenai persoalan keadilan dalam kaitannya dengan hukum. Hal ini dikarenakan hukum atau suatu bentuk peraturan undang-perundang⁸⁷ yang diterapkan dan diterimanya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan sebaliknya hukum itu tidak adil. Problema demikian sering

⁸⁷ A. Hamid . S. Attamini, dikembangkan oleh Maria Farida Indrati S. Dari perkuliahan *Ilmu undang-undang, jenis, fungsi dan materi muatan*, 2007, Kanisius, Yogyakarta.

ditemukan dalam kasus kongkrit seperti dalam suatu proses acara di pengadilan seorang terdakwa terhadap perkara pidana atau seorang tergugat terhadap perkara perdata, maupun tergugat dalam perkara tata usaha negara atau sebaliknya penggugat merasa tidak adil terhadap putusan majelis hakim dan sebaliknya majelis hakim merasa dengan keyakinannya putusan itu telah adil karena putusan itu telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang tertulis dalam bentuk perundang-undangan yaitu berdasarkan teori pembuktian berdasarkan undang-undang positif (*Positif Wetwlijks theorie*)⁸⁸.

Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan komutatif (*justitia commutativa*) dan keadilan distributif (*justitia distributiva*). Keadilan Komutatif adalah keadilan yang mempersamakan prestasi dengan kontraprestasi, keadilan Komutatif ini sifatnya mutlak karena memperhatikan kesamaan dengan memberi hak kepada setiap orang sama banyaknya. Asas mengadili tanpa membedakan orang pada dasarnya lebih dikenal dalam hukum acara perdata. Berdasarkan teori ini, maka kedua belah pihak penggugat maupun tergugat di pandang sama sehingga harus di berlakukan sama dikenal dengan *asas equality before the law*.⁸⁹ Sedangkan keadilan distributif (*justitia distributiva*), yaitu keadilan berupa setiap orang mendapat hak atau bagian secara proporsional sesuai dengan kualitasnya. keadilan distributif ini sifatnya proporsional karena menuntut agar setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau bagiannya.

Istilah keadilan yang diartikan Aristoteles adalah sikap tidak memihak (*impartiality*), persamaan (*equality*) dan kelayakan (*fairness*)⁹⁰ menjadi dasar *asas audi et alteram partem* yang diterapkan dalam peradilan perdata.⁹¹ hal ini bahwa untuk mewujudkan keadilan dalam persidangan,

⁸⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia, Edisi Revisi*, Sinar Grafika, 1996, Jakarta, hlm. 251

⁸⁹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata, *Mimbar Hukum*, Volume 21, Nomor 2, Juni 2009, hlm.365

⁹⁰ Gie The Liang, *Teori-teori tentang Keadilan*, 1982, Super Sukses, Yogyakarta, hlm. 15.

⁹¹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Op.Cit.*, hlm. 203

maka putusan hakim harus dilandasi sikap tidak memihak serta memberikan perlakuan yang sama kepada para pihak.⁹²

3. Teori Kewenangan

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang, istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah *bevoegdheid* dalam istilah hukum Belanda. Jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah *bevoegdheid*, perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah *bevoegdheid* digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum privat. Dalam konsep hukum istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.⁹³ Wewenang (atau sering pula ditulis dengan istilah kewenangan) merupakan “suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan”.⁹⁴

Teori kewenangan ini apabila dihubungkan dengan penelitian maka teori kewenangan dipergunakan untuk mengetahui siapa yang berwenang mengurus protokol Notaris yang sudah meninggal dunia.

H. Penelitian yang relevan

1. Tesis yang berjudul Tanggung Jawab Notaris Terhadap Gugatan Pihak Ketiga Setelah Berakhir Masa Jabatannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Tesis oleh Andi Mirnasari Gusriana, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia). Penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban Notaris

⁹² Bernadus Wibowo Suliantoro, Refleksi tentang Hukum dan Kekuasaan, *Justitia et Pax*, Volume 23, Nomor 1, Juni 2003, hlm 366

⁹³ Sonny Pungus, 2011, *Teori Kewenangan*, diakses dari: URL: <http://sonny-tobelo.blogspot.com/2011/01/teori-kewenangan.html>

⁹⁴ Andi Asrianti, 2013, *Teori Kewenangan*, diakses dari: URL: <http://andiasrianti.blogspot.com/2013/02/normal-0-false-false-false-en-us-zh-cn.html>

setelah purna tugas, bentuk-bentuk gugatan pihak ketiga kepada Notaris yang sudah purna tugas serta perlindungan hukum terhadap Notaris tersebut. Penelitian yang dilakukan tersebut mempunyai kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam hal yang terkait dengan minuta akta yang menjadi protokol Notaris. Akan tetapi pada penelitian sebelumnya lebih spesifik mengenai pertanggungjawaban Notaris dimana Notaris yang bersangkutan masih hidup, sedangkan peneliti lebih menitikberatkan kepada permasalahan dimana Notarisnya telah meninggal dunia.

2. Tesis yang berjudul Analisis Yuridis Tentang Tanggung Jawab Notaris Atas Protokol Notaris Yang Diserahkan Kepadanya, (Tesis oleh Nuzulla Khairani, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia). Penelitian ini membahas tentang aturan dan tata cara peralihan protokol Notaris serta pemeliharaan protokol Notaris tersebut oleh Notaris pemegang protokol. Penelitian yang dilakukan tersebut mempunyai kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Peneliti dalam hal protokol Notaris. Akan tetapi pada penelitian sebelumnya secara spesifik mengenai tata cara dalam hal penyerahan protokol Notaris yang sudah purna tugas dan mengapa protokol Notaris harus dijaga, dirawat dan dipelihara oleh Notaris pemegang protokol, sedangkan peneliti lebih spesifik membahas tentang protokol Notaris yang belum ada serah terima kepada Notaris lain sebagai pemegang protokol Notaris sehingga menyebabkan protokol Notaris tidak terawat dan dimungkinkan hilang atau terjadi kerusakan pada minuta-minuta akta yang menjadi protokol Notaris.
3. Tesis yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Pengawasan Terhadap Notaris Sebagai Pemegang Protokol (Tesis oleh Ria Trisnomurti, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin). Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Notaris terhadap kewajiban Notaris sebagai pemegang protokol Notaris dan upaya hukum terhadap kewajiban Notaris sebagai pemegang protokol Notaris yang tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan. Penelitian yang dilakukan tersebut mempunyai kesamaan dengan penelitian

yang dilakukan oleh Peneliti dalam kewenangan Majelis Pengawas Daerah selaku lembaga pengawas yang mengawasi tentang Notaris termasuk dalam hal yang terkait dengan protokol Notaris. Akan tetapi pada penelitian sebelumnya secara spesifik mengenai tugas, kewenangan dari Majelis Pengawas Daerah terkait dengan pengawasan terhadap Notaris pemegang protokol, sedangkan peneliti belum menemukan peran aktif Majelis Pengawas Daerah terhadap protokol Notaris yang dimana Notaris yang bersangkutan meninggal dunia.

I. Kerangka Berfikir

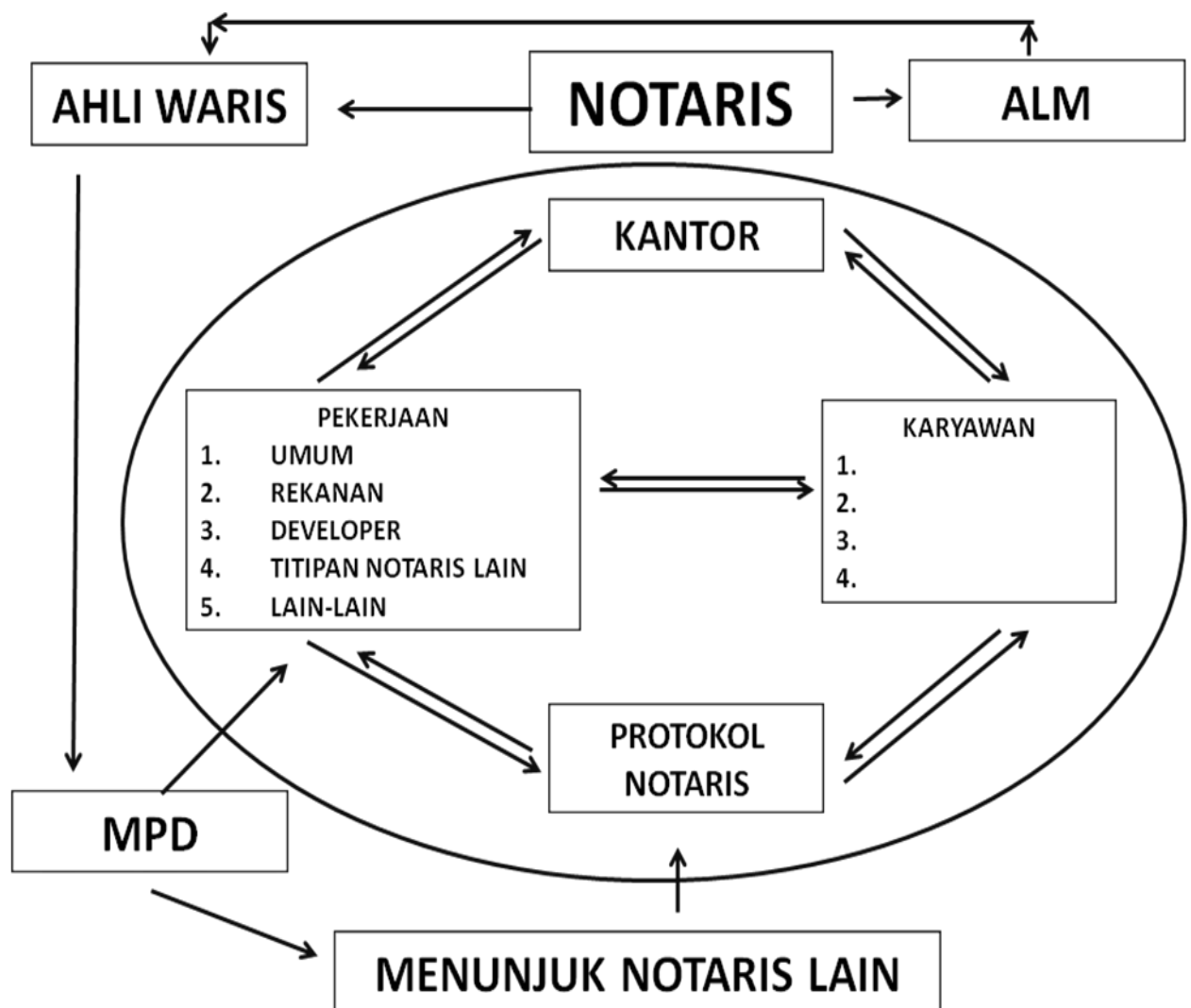
- Undang-undang yang mengatur tentang jabatan Notaris di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dan berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang tersebut :

“Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.”⁹⁵
- Minuta atau asli akta yang terdapat dalam Protokol Notaris adalah arsip negara yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti otentik yang sempurna.
- Profesi Notaris sangatlah penting, karena sifat dan hakikat dari pekerjaan Notaris yang sangat berorientasi pada pembuktian, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak, dan kewajiban para pihak yang terlibat, dalam pembuatan akta Notaris harus memuat keinginan atau kehendak para pihak yang dituangkan kedalam akta Otentik.
- Dalam hal Notaris meninggal dunia maka terkait pekerjaan Notaris banyak yang belum terselesaikan, sedangkan disisi lain akta-akta tersebut

⁹⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (1).

merupakan bukti terjadinya perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang menghendaki dibuatnya akta-akta tersebut.

- Alur Pemikiran tersebut diatas dapat peneliti gambarkan dalam bentuk bagan sebagaimana lampiran berikut :



BAB III

METODE PENELITIAN

Suatu penelitian memiliki arti ilmiah apabila menggunakan metodologi yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Metode penelitian merupakan bagian yang terpenting dari suatu penelitian, karena metode penelitian ini akan menjadi arah dan petunjuk bagi suatu penelitian.⁹⁶

Pengertian metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memecahkan masalah yang ada dengan cara mengumpulkan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Metodologi penelitian menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Metode penelitian merupakan suatu unsur mutlak yang harus ada dalam penelitian. Metode penelitian sangat menentukan dalam suatu penelitian ilmiah, karena mutu nilai validitas dari hasil penelitian ilmiah sangat ditentukan oleh pemilihan metode penelitiannya secara tepat. Pada dasarnya yang dicari dalam penelitian adalah “pengetahuan” atau lebih tepatnya “pengetahuan yang benar”, dimana pengetahuan yang benar ini nantinya dapat dipakai untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu.⁹⁷

Dalam penulisan tesis ini dipergunakan beberapa metode dengan maksud agar lebih mudah dalam menganalisa, karena apabila dilakukan tanpa menggunakan suatu metode maka penulisan suatu tesis tidak akan mendapatkan hasil yang memuaskan.

Metode penulisan tesis adalah uraian tentang cara bagaimana mengatur penulisan tesis dengan usaha yang sebaik-baiknya. Sedangkan metode penelitian yang dipergunakan dalam pengumpulan data-data untuk penulisan tersebut antara lain meliputi :

⁹⁶ Mukti Fajar ND. *Op.cit.* Hlm 104

⁹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, 2011, cetakan Kedua belas, Jakarta, hlm. 27.

A. Jenis Penelitian

Menurut Setiono metode adalah alat untuk mencari jawaban dari suatu masalah, oleh karena itu suatu metode atau alat harus jelas dahulu yang akan dicari.⁹⁸ Untuk memudahkan tercapainya sasaran yang hendak tercapai dalam penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu dengan menggunakan penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang selanjutnya direkonstruksi menjadi rangkaian hasil penelitian.

B. Pendekatan Penelitian

Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Hal ini harus dilakukan oleh peneliti karena peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian tersebut dan karena sifat hukum yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. *Comprehensive*, artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan yang lainnya secara logis.
2. *All-inclusive*, artinya bahwa norma-norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekosongan hukum.
3. *Systematic*, artinya yaitu bahwa disamping berurutan antara satu dengan yang lainnya, norma-norma hukum tersebut tersusun secara hierarkis.⁹⁹

Pendekatan konseptual diperoleh dari pandangan, pendapat atau doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting karena pemahaman terhadap pandangan, pendapat atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan, pendapat,

⁹⁸ Setiono, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2005, hlm. 19

⁹⁹ Johny Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, 2006, Boymedia Publishing, Malang, hlm.303.

doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹⁰⁰

C. Jenis Data

Dalam penelitian normatif ini peneliti mempergunakan jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka yang telah dibuat dalam bentuk suatu kumpulan seperti dokumen, buku – buku, perundang – undangan, teori, bahan dari kepustakaan, dan sumber – sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yang meliputi hal – hal berikut ini :

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara yuridis, terdiri dari :

- a) Pancasila.
- b) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- e) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01.HT.03.01 Tahun 2006 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, dan Pemberhentian Notaris.

¹⁰⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, 2005, Cetakan Ke-6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm. 20.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, terdiri dari :

- a) Jurnal.
- b) Buku – buku Ilmu Hukum.
- c) Buku – buku mengenai Notaris.
- d) Data Internet yang berkaitan dengan pengetahuan tentang protokol Notaris.

E. Teknik Memperoleh Data

Teknik memperoleh data diperlukan agar data yang diperoleh merupakan data yang akurat dan jelas terhadap penelitian yang dilakukan. Teknik memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah dimana teknik memperoleh data dilakukan dengan cara membaca, mempelajari dan mencatat buku – buku serta peraturan undang–undang yang relevan dan berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti dalam penulisan hukum ini. Karena dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*), maka yang harus dilakukan oleh peneliti adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu tersebut. Perundang-undangan dalam hal ini berupa *legislation* maupun *regulation delegated legislation dan delegated regulation*. Oleh karena itulah untuk memecahkan suatu isu hukum, peneliti mungkin harus menelusuri sekian banyak peraturan perundang-undangan termasuk perundang-undangan zaman Belanda. Sedangkan dalam kaitannya dengan pendekatan secara konseptual (*conseptual approach*), maka peneliti berusaha untuk melakukan penelusuran terhadap isu tersebut.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap yang paling penting dalam penelitian hukum normatif. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengolahan yang pada hakekatnya untuk mengadakan sistematisasi

terhadap bahan – bahan hukum tertulis. Sesuai dengan jenis data yang normatif maka yang digunakan dalam teknik analisis data kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data, mengkualifikasi, kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil. Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan.

BAB IV

PEMBAHASAN

1. Tanggung jawab ahli waris dan MPD terhadap protokol Notaris yang belum diserahkan kepada penerima protokol Notaris.

Kehadiran warga masyarakat ke kantor Notaris sebagai klien untuk meminta bantuan jasa Notaris dalam hal pembuatan akta otentik akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara para klien dan Notaris yang bersangkutan. Notaris berkewajiban untuk membuat akta otentik yang dikehendaki oleh para klien yang menjadi pihak dalam akta dan mendapatkan hak untuk menerima pembayaran atas jasanya tersebut. Sedangkan para klien berhak untuk menerima akta otentik sesuai yang dikehendaki dan berkewajiban untuk memberikan pembayaran atas jasa yang diberikan oleh Notaris. Kewajiban dari Notaris ini tidak bisa dialihkan kepada ahli warisnya apabila Notaris yang bersangkutan meninggal dunia sehingga ahli waris tidak bisa dituntut ataupun dipaksa untuk menyelesaikan pembuatan akta. Ahli waris bisa membantu merekomendasikan agar dibuatkan oleh Notaris lain atau mengembalikan biaya pembuatan akta yang telah dibayarkan apabila ada bukti pembayaran dari kantor Notaris kepada klien.

Seperti yang telah diketahui bahwa tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris.¹⁰¹ Dalam kenyataannya, tidak selamanya seorang Notaris dapat terus-menerus memegang profesi yang diamanahkan kepadanya dan menjalankan tugas-tugas tersebut.

Notaris berkewajiban secara langsung terhadap protokol Notaris. Pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat saat ini adalah tidak seluruhnya Notaris tersebut memahami prosedur penyerahan protokol Notaris dan mau melaksanakan kewajibannya menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris yang telah ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Sama halnya ketika ada Notaris yang meninggal dunia. Ahli waris dari Notaris yang bersangkutan

¹⁰¹ Supriadi, *Loc.Cit.*

kadang tidak memahami tata cara atau prosedur peralihan protokol Notaris. Hal ini disebabkan karena minimnya sosialisasi mengenai protokol Notaris, baik itu dari Notaris kepada keluarganya, Notaris kepada para karyawan, dari MPD dan organisasi Notaris kepada para Notaris maupun dari MPD dan organisasi Notaris kepada masyarakat luas. Minimnya sosialisasi mengenai protokol Notaris ini menyebabkan kesimpangsiuran masyarakat yang membutuhkan protokol yang seharusnya bisa disimpan dan diserahkan kepada Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah. Secara tidak langsung dapat berakibat fatal bahkan dapat menimbulkan kerugian material yang sangat besar terhadap masyarakat yang akan atau masih membutuhkan akta yang terdapat didalam protokol Notaris yang purna tugas atau yang telah meninggal dunia untuk keperluan kepastian hukumnya.

Dalam pasal 1 Undang – Undang No. 2 tahun 2014 tentang jabatan Notaris, angka 13 disebutkan bahwa protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris.

Dalam pasal 62 UUNJN tentang jabatan Notaris disebutkan bahwa penyerahan protokol Notaris dalam hal Notaris :

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah berakhir masa jabatannya;
- c. Minta sendiri;
- d. Tidak mampu secara rohani dan atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3(tiga) tahun;
- e. Diangkat menjadi pejabat negara;
- f. Pindah wilayah jabatan;
- g. Diberhentikan sementara; atau
- h. Diberhentikan dengan tidak hormat;

Sedangkan mengenai penyerahan protokol Notaris diatur dalam pasal 63 UUNJN Perubahan yaitu :

1. Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris.
2. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris

Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.

3. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan.
4. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf h, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.
5. Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah.
6. Dalam hal Protokol Notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil Protokol Notaris.”

Berhentinya jabatan seseorang sebagai Notaris salah satunya disebabkan karena Notaris yang bersangkutan telah meninggal dunia. Dengan meninggalnya seorang Notaris mengakibatkan segala tanggung jawabnya berakhir dan protokol-protokol Notaris yang bersangkutan harus segera diserahkan kepada Notaris lain yang telah ditunjuk Majelis Pengawas Daerah selaku pemegang protokol. Keterangan tersebut ditegaskan dalam Pasal 63 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 jo. UU Nomor 2 Tahun 2014 yaitu:

“Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.”¹⁰²

Peraturan telah memberikan jalan bagi para Notaris untuk tetap menjaga keautentikan dari protokol-protokol yang telah dibuat selama masa jabatannya. Terkait protokol-protokol Notaris yang meninggal dunia diberi ketentuan oleh UUN untuk menyerahkan protokol-protokol tersebut ke Notaris lain melalui ahli warisnya paling lama 30 (tiga puluh hari) hari setelah

¹⁰² Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 63 ayat (2).

Notaris yang bersangkutan meninggal dunia (Pasal 63 ayat (1) UU nomor 30 tahun 2004 jo. UU nomor 2 tahun 2014).

Pada prinsipnya setiap kali ada Notaris yang meninggal dunia, berdasarkan pasal 35 ayat (2) Undang –Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris maka : Keluarganya wajib memberitahukan kepada MPD Notaris paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.¹⁰³

Dalam hal Notaris meninggal dunia, maka protokol Notaris tersebut akan diserahkan kepada Notaris lain.¹⁰⁴ Penyerahan protokol Notaris dalam hal meninggal dunia dilakukan oleh ahli waris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh MPD.¹⁰⁵

Setiap Notaris dalam menjalankan jabatannya senantiasa diawasi oleh lembaga yang diberikan kewenangan oleh Menteri. Dengan berlakunya UUNJ, mengenai pengawasan, pembinaan, pemeriksaan, dan penjatuhan sanksi Notaris, tugas tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris. Dengan tujuan terutama untuk menjaga dan melindungi kepentingan masyarakat terhadap akta Notaris sebagai akta otentik yang merupakan bagian dari protokol Notaris, berkaitan dengan peranannya sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan penuh.

Majelis Pengawas Notaris melakukan Pengawasan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris.

Fungsi Majelis Pengawas seperti yang dimaksud untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Dalam kaitan ini, menghimbau kepada para Notaris agar berhati-hati dalam menjalankan tugas jabatannya, agar bekerja sesuai peraturan yang berlaku, serta bersikap netral tidak memihak. Demi menjaga keluhuran dan martabat jabatan seorang Notaris.

¹⁰³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 35 ayat (2).

¹⁰⁴ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 62 huruf a.

¹⁰⁵ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 63 ayat (2).

Majelis Pengawas Notaris sebagai satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pembinaan, pemeriksaan, dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris.

Majelis pengawas dalam UUIJN dan UUIJN Perubahan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Menurut ketentuan umum Pasal 1 ayat (6) UUIJN Perubahan :

“Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris”.

Pasal 1 angka 14 : Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang kenotariatan.

Mengenai pengangkatan dan pemberhentian Notaris tertuang dalam ketentuan Pasal 2 UUIJN yang berbunyi : Notaris diangkat dan diberhentikan oleh menteri.

Pasal 67 ayat (1) UUIJN dan UUIJN Perubahan menentukan bahwa yang melakukan pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri. Mengenai pelaksanaannya antara lain ditindak lanjuti oleh Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Juncto Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.39-PW.07.10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut Menteri membentuk Majelis Pengawas berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UUIJN.

Pasal 67 ayat (3) UUIJN Perubahan menentukan Majelis Pengawas tersebut terdiri dari 9 (sembilan) orang, terdiri dari unsur :

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
- c. Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Pasal 68 UUJN, Majelis pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) terdiri atas :

- a. Majelis Pengawas Daerah;
- b. Majelis Pengawas Wilayah;
- c. Majelis Pengawas Pusat.

Pasal 69 menyatakan sebagai berikut :

1. Majelis Pengawas Daerah dibentuk di Kabupaten/Kota.
2. Keanggotaan Majelis Pengawas Daerah terdiri atas unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3).

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 70 UUJN adalah :

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini; dan
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Pasal 71 UUJN, MPD berkewajiban :

- a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibukukan sejak tanggal pemeriksaan terakhir;

- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada MPW setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, organisasi Notaris, dan MPP;
- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- e. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada MPW dalam waktu 30 hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, MPP dan organisasi Notaris;
- f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Ujung tombak dari pelaksanaan pengawasan terhadap Notaris adalah MPD. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, yang merupakan salah satu peraturan pelaksanaan dari UUJN telah mengatur mengenai kewenangan pengawasan dimaksud yang tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 13 :

1. Kewenangan MPD yang bersifat administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua, atau salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat MPD.
2. Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Memberikan izin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 bulan;
 - b. Menetapkan Notaris pengganti;
 - c. Menentukan tempat penyimpanan protokol Notaris yang pada saat serah terima protokol Notaris telah berumur 25 tahun atau lebih;
 - d. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang;
 - e. Memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan undang-undang;
 - f. Menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, dan surat di bawah tangan yang dibukukan yang telah disahkannya, yang

dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 hari kalender pada bulan berikutnya, yang memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal dan judul akta.

Pasal 14, Kewenangan MPD yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat adalah :

- a. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;
- b. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang protokol Notaris yang meninggal dunia;
- c. Memberikan persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk proses peradilan yakni;
- d. Menyerahkan fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan
- e. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka pelaksanaan kewenangan pengawasan mengenai perbuatan dalam Pasal 14 huruf a sampai dengan Pasal 14 huruf e tersebut harus berdasarkan hasil dari keputusan rapat MPD yang khusus diadakan untuk itu.

Keberadaan Notaris adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dilayani, pelaksanaan pengawasan terhadap perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris bukanlah hal yang mudah sehingga oleh karena itu diperlukan adanya peranan pengawasan terhadap Notaris yang dilakukan selain oleh majelis pengawas, organisasi perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia, juga masyarakat. Masyarakat telah diberi kewenangan oleh UUN untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris, dengan cara melaporkan Notaris yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan kode etik Notaris, kepada majelis pengawas dan kemudian laporan masyarakat itu akan diselesaikan (untuk pertama kalinya) oleh MPD di tempat kedudukan Notaris yang dilaporkan, dan apabila berlanjut terus, maka laporan masyarakat tersebut kemudian akan ditindaklanjuti oleh MPW dan selanjutnya oleh MPP. Demikian halnya dengan masyarakat yang pernah meminta kepada seorang Notaris untuk dibuatkan akta otentik yang

kemudian Notaris yang bersangkutan meninggal dunia, maka apabila ada masyarakat selaku pihak atau ahli waris dari para pihak dalam akta otentik tersebut menghendaki diperlihatkan atau meminta salinan akta terkait protokol Notaris yang telah meninggal dunia bisa membuat laporan dan pengaduan kepada MPD setempat.

Tata cara pelaksanaan kewenangan pemeriksaan oleh majelis pengawas (secara berjenjang) terhadap Notaris karena adanya laporan masyarakat sesuai UUJN, telah diatur lebih lanjut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 35 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Singkatnya laporan masyarakat dapat dilakukan oleh masyarakat kepada majelis pengawas, apabila seseorang atau masyarakat merasa dirugikan berkaitan dengan perilaku Notaris atau pelaksanaan jabatan Notaris termasuk pula yang berkaitan dengan protokol Notaris.

Sebagaimana kita ketahui bahwa protokol Notaris sebagai arsip negara merupakan dokumen yang sangat penting sehingga tidak boleh sampai hilang ataupun musnah. Sedangkan jika arsip negara yang penting ini disimpan pada tempat biasa seperti rumah atau kantor maka resiko untuk hilang atau musnahnya arsip ini sangat tinggi, oleh karena itu Undang-Undang mengamankan apabila ada Notaris yang meninggal dunia maka para ahli waris dari Notaris yang meninggal dunia tersebut segera memberitahukan kepada MPD dan kemudian MPD menunjuk Notaris lain sebagai pemegang protokol dari Notaris yang telah meninggal dunia. Terkait dengan kewajiban penyerahan protokol Notaris ini tidak semua ahli waris memahami dan segera melaksanakannya, sehingga Undang-Undang memberikan solusi dengan memberikan kewenangan kepada MPD untuk mengambil protokol Notaris.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 63 ayat (6).

Bertumpu pada ketentuan Pasal 63 ayat (6) UUJNP yang menegaskan bahwa : “Dalam hal Protokol Notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil Protokol Notaris”, apabila ada Notaris yang meninggal dunia dan protokol-protokol Notarisnya belum diserahkan oleh para ahli waris Notaris kepada MPD atau bahkan belum ada Notaris pemegang protokol maka seharusnya MPD segera bertindak proaktif dan segera mengambil langkah untuk menyelesaikan protokol Notaris yang terlantar. Undang-undang telah memberikan kewenangan sepenuhnya kepada MPD untuk menyelesaikan permasalahan protokol Notaris yang belum terselesaikan. Disinilah diperlukan ketegasan MPD mengenai proses penyerahan dan penyimpanan protokol-protokol Notaris yang telah meninggal dunia tersebut agar sesuai dengan peraturan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, UUJN telah memberikan kewenangan kepada majelis pengawas Notaris, masyarakat dan organisasi Notaris, untuk melakukan pengawasan melalui mekanisme dan tata cara sebagaimana telah diuraikan di atas, terhadap akta Notaris dan Notaris dalam pelaksanaan jabatannya sebagai pemegang protokol Notaris.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan. Sebagaimana tercantum dalam kalimat terakhir kutipan di atas, Akta Notaris dan Protokol Notaris bukan hanya menjaga kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan semata-mata, melainkan sekaligus juga bagi masyarakat secara keseluruhan.

2. Penyelesaian akta Notaris yang belum diselesaikan setelah Notaris yang bersangkutan meninggal dunia.

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan penuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain-lain, kebutuhan akan alat bukti tertulis berupa akta otentik semakin meningkat sejalan dengan perkembangannya. Tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial semakin dibutuhkan.

Untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum sebagai kebutuhan masyarakat terhadap akta otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum sangatlah penting. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tercantum dalam akta, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula dapat menghindari terjadinya sengketa. Dalam hal sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan penuh memberikan sumbangan nyata terhadap penyelesaian sengketa yang terjadi di antara para pihak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 02 tahun 2014 tentang jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan-kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam UUJN. Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris menyebutkan sebagai berikut :

"Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang".¹⁰⁷

¹⁰⁷ Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,, Pasal 15 ayat (1).

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku tentunya akan memberikan kepastian hukum kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan akta notaris dapat menjadi pedoman oleh para pihak.

Prosedur dalam pembuatan akta otentik telah diatur dalam UUJN jo UUJNP yang menyebutkan bahwa akta harus dibacakan di hadapan para penghadap dan para saksi serta ditandatangani oleh semua pihak. Ketentuan-ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN Perubahan yang menyatakan bahwa :

”Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.”¹⁰⁸

Ketentuan pasal tersebut di atas menegaskan keberadaan penghadap merupakan suatu hal yang mutlak yang menghendaki dibuatkannya suatu akta. Keberadaan penghadap dalam akta Notaris lebih lanjut diatur dalam Pasal 39 UUJN Perubahan yang menetapkan sebagai berikut :

- (1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum.
- (2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenalan yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.
- (3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam Akta.

¹⁰⁸ Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 ayat (1) huruf m.

Kehadiran penghadap dalam akta Notaris dikategorikan dalam beberapa jenis yaitu :

1. Penghadap untuk diri sendiri.

Penghadap untuk diri sendiri adalah pihak dalam akta yang kehadirannya dalam akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris bertindak langsung untuk dirinya tanpa harus bergantung pada pihak lainnya. Setiap penghadap dalam akta harus dikenal oleh Notaris, baik dikenal secara langsung oleh Notaris maupun diperkenalkan oleh pihak atau saksi pengenalan.

2. Penghadap selaku kuasa, baik secara lisan maupun secara tertulis.

Pihak penghadap di dalam akta apabila tidak dapat menghadiri pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris dapat memberikan kuasa kepada pihak lain, baik secara lisan maupun secara tertulis. Ketentuan pemberian kuasa berlaku ketentuan yang diatur dalam Pasal 1792 – Pasal 1819 KUH Perdata dan ketentuan-ketentuan lain yang diatur secara khusus untuk pemberian kuasa dalam melakukan perbuatan hukum tertentu atau pada suatu ketentuan khusus yang mengatur tentang pemberian kuasa seperti pemberian kuasa yang diatur dalam anggaran dasar suatu badan.

3. Penghadap selaku wakil, baik karena jabatan/kedudukan atau sebagai kuratele atau karena hukum.

Pihak penghadap di dalam akta apabila tidak dapat menghadiri pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, dalam kapasitas jabatan atau pangkat atau kedudukannya, maka pejabat atau pihak yang karena kedudukan dan kewenangannya disebut mewakili. Penghadap pejabat atau pihak yang karena kedudukan dan kewenangannya mewakili tersebut dapat pula memberikan kuasa kepada pihak lain, baik secara lisan maupun secara tertulis. Yang dimaksud dengan pejabat atau pihak yang

karena kedudukan dan kewenangannya diatur dalam Pasal 1313 – 1351 KUH Perdata dan Pasal 1352 – 1380 KUH Perdata.

4. Penghadap selaku wali, baik sebagai ayah yang menjalankan kekuasaan orang tua atau wali ibu atau wali berdasarkan keputusan pengadilan.

Penghadap yang masih dibawah umur secara hukum belum dianggap dewasa dan cakap hukum, sehingga apabila hendak melakukan perbuatan hukum dalam pembuatan akta maka harus ada pengampu sebagai wali dari penghadap yang masih dibawah umur tersebut.

5. Penghadap sebagai pihak yang turut serta menjadi pihak yang terkait atau berkaitan kepentingan dalam akta.

Kehadiran pihak lain dalam akta Notaris dapat terjadi apabila ada pihak-pihak lain yang terkait dengan segala sesuatu atau hal-hal tertentu yang ada dalam akta Notaris.

Keberadaan saksi dalam setiap pembuatan akta ditegaskan dalam Pasal 40 UUDN Perubahan yaitu :

- (1) Setiap Akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. Mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta;
 - d. Dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
 - e. Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.

- (4) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam Akta.¹⁰⁹

Kedudukan saksi akta Notaris pada umumnya merupakan saksi yang mendengar, melihat sendiri suatu peristiwa hukum yang terjadi. Kedudukan saksi akta Notaris merupakan perintah undang-undang (UUJN) untuk memenuhi syarat formal akta Notaris.

Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN Perubahan di atas menegaskan bahwa asli akta atau minuta akta Notaris tercantum paraf jika di dalam akta terdapat perubahan isi akta, atau jika akta dibaca sendiri oleh para pihak, pemberian paraf ini menegaskan bahwa para penghadap telah membaca, mengerti dan memahami isi akta. Selain itu dalam akta terdapat juga tanda tangan para pihak yang berkepentingan dalam akta tersebut, para saksi, saksi (-saksi) pengenal jika ada, penerjemah jika ada, dan Notaris sendiri. Yang dimaksud dengan paraf dalam pengertian umum adalah tanda tangan yang disederhanakan atau singkatan dari tanda tangan.

Definisi tanda tangan oleh Tan Thong Kie dirumuskan dan dijelaskan sebagai berikut :

“Tanda tangan adalah suatu pernyataan kemauan pembuat tanda tangan (penandatanganan), bahwa ia dengan membubuhkan tanda tangannya dibawah suatu tulisan menghendaki agar tulisan itu dalam hukum dianggap sebagai tulisannya sendiri.”¹¹⁰

Pengertian tanda tangan secara umum adalah tanda tangan yang dapat didefinisikan sebagai suatu susunan (huruf) tanda berupa tulisan dari yang menandatangani dengan mana orang yang membuat pernyataan tersebut dapat diindividualisasikan.¹¹¹

Tujuan dari tanda tangan adalah untuk memastikan identitas dari pihak-pihak yang telah mengikatkan dirinya dalam akta, sebagai bukti sepakat untuk

¹⁰⁹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 40 ayat (1) .

¹¹⁰ Tan Thong Kie, *loc.cit.*, hlm. 473.

¹¹¹ Herlien Budiono, *loc.cit.*, hlm. 220

mengikuti segala ketentuan yang telah dirundingkan sebelumnya dengan pihak lain serta sebagai syarat sahnya perjanjian sebagai salah satu bentuk perikatan.

Fungsi tanda tangan dalam suatu akta adalah untuk memastikan identifikasi atau menentukan kebenaran ciri-ciri penandatanganan. Sekaligus pendatangan menjamin keberadaan isi yang tercantum dalam akta tersebut.

Selain bentuk tanda tangan di atas, cap jempol juga dapat dijadikan sebagai penegasan identitas para pihak yang melakukan perjanjian dalam akta. Cap jempol dipersamakan dengan tanda tangan sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1874 KUH Perdata yang menyebutkan sebagai berikut :

“Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa peran-peran seorang pegawai umum. Dengan penandatanganan sepucuk tulisan di bawah tangan dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggung dari seorang notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh undang-undang dari mana, ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol, atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan di hadapan pegawai tadi. Pegawai ini harus membukukan tulisan tersebut. Dengan undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud”.

Pembubuhan paraf dan atau tanda tangan dan/atau cap jempol tangan para pihak atau para penghadap pada akta Notaris dimaksudkan sebagai bukti nyata dan bukti otentik yang menegaskan bahwa : ¹¹²

- a) Notaris telah membacakan dan menjelaskan/menerangkan kepada para pihak (penghadap) hal-hal yang dimuat dalam akta Notaris dihadapan para saksi;
- b) Hal-hal yang dimuat dalam akta Notaris merupakan kehendak dan keinginan (para) penghadap/pihak yang tidak ada paksaan dan dilakukan dengan sadar dan sukarela;

¹¹² Michael Josef Widiyatmoko, Sunarto, Wahyu Nugroho, *loc.cit*, hlm. 173.

- c) (Para) pihak atau penghadap telah memahami, mengerti, mengetahui, sepakat dan menyetujui hal-hal yang dimuat dalam akta Notaris yang ditandatangani;
- d) Segala hal dan atau surat atau dokumen yang menjadi alas hak dalam pembuatan akta Notaris yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris adalah asli, sah dan benar;
- e) (Para) penghadap telah benar-benar hadir, atau berhadapan, atau menghadap di hadapan Notaris dan para saksi;

Akta Notaris yang ditandatangani tersebut merupakan peraturan dan ketentuan yang mengikat (para) penghadap atau pihak dan merupakan alat bukti otentik bagi (para) penghadap/pihak lain yang terkait berkepentingan atas akta Notaris tersebut. Akta Notaris sebagai alat bukti otentik dibuat oleh atau dihadapan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik di dalam suatu daerah yang menjadi kewenangan Notaris dalam bentuk dan tata cara sesuai dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara keseluruhan akta Notaris disebut lengkap jika semua syarat formal tersebut dipenuhi sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga kedudukan saksi akta yang merupakan salah satu syarat formal dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Akta yang dibuat oleh Notaris memiliki sifatnya sebagai akta hukum yang diakui dan memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana pendapat R. Soegondo Notodisoerjo sebagai berikut :

“Akta Notaris dapat diterima dalam sidang di pengadilan sebagai alat bukti yang mutlak mengenai isinya, walaupun terhadap akta itu masih dapat diadakan penyangkalan dengan bukti sebaliknya oleh para saksi, apabila mereka yang membuktikan tersebut dapat membuktikan bahwa apa yang diterangkan dalam akta itu adalah tidak benar.”¹¹³

Terkait penandatanganan akta dijelaskan dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) UUDN jo UUDN Perubahan yang menyebutkan sebagai berikut :

¹¹³ R. Soegondo Notodisoerjo, *loc.cit*, hlm.19.

“Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.”¹¹⁴

Ketentuan tentang prosedur pembuatan akta tersebut dalam prakteknya banyak sekali Notaris yang tidak melaksanakannya, Notaris tidak membacakan akta atau yang membacakan akta adalah karyawannya, tidak dihadiri oleh saksi, atau Notaris tidak langsung menandatangani minuta akta dan tidak langsung membuat salinan akta. Penundaan penandatanganan oleh para pihak yang terkait dalam akta, tanda tangan dari para saksi atau bahkan tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan akan menjadi masalah ketika Notaris yang bersangkutan meninggal dunia karena minuta akta belum sempurna ditandatangani. Prosedur yang benar dalam pembuatan minuta akta merupakan kewajiban dari Notaris, dalam hal yang menjadi tata cara prosedur tersebut tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan cacat hukum terhadap minuta dan salinan akta. Adanya cacat hukum dalam pembuatan akta akan menyebabkan hak-hak para klien tidak akan terpenuhi.

Meninggalnya seorang Notaris menyebabkan terhentinya segala sesuatu terkait dengan tugas dan wewenang Notaris seperti yang dijelaskan di atas. Semua pekerjaan Notaris akan berhenti seketika dengan meninggalnya Notaris. Dalam hal Notaris yang bersangkutan meninggal dunia dan pihak kantor Notaris masih menyelesaikan pembuatan salinan akta ataupun pemberkasan lainnya maka patut dipertanyakan otentisitas aktanya, karena jika terbukti penyelesaian pekerjaan tersebut setelah Notaris yang bersangkutan meninggal dunia maka hal itu bisa diidentifikasi terjadinya tindakan pemalsuan yang bisa merugikan beberapa pihak dan menjadi permasalahan hukum dengan adanya tindakan pemalsuan. Jika hal ini terjadi maka bisa masuk ke ranah pidana dengan jeratan Pasal 263 dan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹¹⁴ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 44 ayat (1) .

Ketentuan dalam Pasal 263 KUHP menyebutkan sebagai berikut :

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau untuk menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Ketentuan Pasal 264 KUHP menyebutkan :

- (1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap :
 1. Akta-akta otentik;
 2. Surat utang atau sertifikat utang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;
 3. Surat sero atau utang atau sertifikat sero atau utang dari suatu surat perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 4. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;
 5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukan untuk diedarkan.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsukan, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Kehadiran klien yang membutuhkan jasa Notaris pastinya tidak lepas dari hal-hal yang menjadi tugas dan kewenangan Notaris. Mengenai tugas dan kewenangan Notaris tercantum dalam Pasal 15 UUN Perubahan yang menyebutkan hal-hal berikut ini :

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta,

- menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
 - f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. Membuat Akta risalah lelang.
 - (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹¹⁵

Selain yang tercantum dalam Pasal tersebut, klien Notaris juga berhak untuk mendapatkan informasi terkait kehendak para klien apakah bisa dikerjakan atau tidak bisa dikerjakan.

Meninggalnya seorang Notaris mengakibatkan terhentinya semua pekerjaan pada kantor Notaris yang bersangkutan sehingga akan menghambat dan terjadi penundaan terwujudnya alat bukti yang dikehendaki oleh para klien, baik itu klien secara umum, rekanan bank, klien developer atau pengembang, bahkan terhadap pekerjaan dari rekanan sesama Notaris. Meninggalnya seorang Notaris akan menyebabkan hal-hal sebagai berikut :

- Tidak selesainya minuta dan atau salinan akta.
- Tidak adanya alat bukti otentik.
- Tidak adanya kejelasan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang tertuang dalam akta.

¹¹⁵ Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 15.

- Terhambatnya hak-hak dari masing-masing pihak.
- Tidak adanya dasar hukum sebagai dasar perbuatan hukum selanjutnya.

Mengingat arti pentingnya akta Notaris sebagai alat bukti yang terkuat dan penuh maka klien kantor Notaris akan sangat dirugikan dengan tidak terselesaikannya akta otentik yang dikehendaki oleh para pihak. Meninggalnya Notaris yang bersangkutan harus segera diberitahukan kepada para klien kantor Notaris oleh para ahli waris Notaris yang telah meninggal dunia tersebut agar bisa segera dicarikan solusi terhadap akta-akta otentik yang tidak bisa diselesaikan demi terwujudnya alat bukti otentik serta terjaminnya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam akta.

Secara prosedural setelah Notaris meninggal dunia maka merupakan kewajiban bagi ahli waris dari Notaris untuk memberikan laporan perihal meninggalnya Notaris tersebut kepada MPD. Setelah adanya laporan tersebut maka MPD segera menunjuk Notaris lain sebagai pemegang protokol dari Notaris yang telah meninggal dunia. Para ahli waris Notaris diberikan waktu 30 (tiga puluh) hari sejak meninggalnya Notaris yang bersangkutan untuk menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh MPD sebagai pemegang protokol Notaris.¹¹⁶ Penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol Notaris harus dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan yang memutuskan, menunjuk, dan menetapkan seorang Notaris sebagai pemegang protokol Notaris. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut maka Notaris yang ditunjuk sebagai pemegang protokol akan bisa membantu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kantor Notaris yang belum terselesaikan dan sekaligus mengurus dan menyelesaikan segala sesuatu terkait dengan protokol Notaris.

Pada prinsipnya dengan meninggalnya seorang Notaris maka semua pekerjaan terkait dengan tugas dan kewenangan Notaris akan terhenti pada saat itu juga. Hal ini akan menyebabkan permasalahan terhadap pekerjaan kantor

¹¹⁶ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Pasal 63 ayat (1).

dan dengan adanya Notaris lain yang ditunjuk oleh MPD akan sangat membantu penyelesaian pekerjaan-pekerjaan yang tertunda karena meninggalnya seorang Notaris.

Terhadap pekerjaan Notaris yang tertunda penyelesaiannya baik itu akta-akta yang belum dikerjakan ataupun akta-akta yang dalam proses pengerjaan dapat dibantu penyelesaiannya oleh Notaris lain yang ditunjuk oleh MPD selaku Notaris pemegang protokol.

Permasalahan meninggalnya Notaris tersebut harus segera disampaikan kepada para klien dan kemudian disampaikan juga mengenai pekerjaan-pekerjaan yang tertunda penyelesaiannya yang akan dilimpahkan kepada Notaris lain untuk penyelesaiannya. Tentunya dengan memberikan kebebasan kepada para klien untuk memilih apakah dilanjutkan oleh Notaris lain yang telah ditunjuk atau mencabut berkasnya untuk diselesaikan oleh Notaris yang dipilih sendiri oleh klien.

Klien Notaris yang menghendaki untuk dibuatkan akta oleh Notaris setelah dibacakan aktanya biasanya langsung menandatangani akta tersebut, meskipun tidak menutup kemungkinan para penghadap belum lengkap menandatangani minuta akta dikarenakan tidak bersamaan menghadap Notaris. Tidak lengkapnya tanda tangan para pihak, para saksi dan/atau tanda tangan dari Notaris yang bersangkutan sebelum meninggal dunia akan menyebabkan minuta akta tersebut tidak bisa dilanjutkan dan diselesaikan prosesnya, terlebih lagi untuk mengeluarkan salinan akta. Hal ini dikarenakan para pihak menghadap kepada Notaris pada waktu Notaris yang bersangkutan masih hidup dan tidak langsung ditandatangani oleh para saksi dan Notaris yang bersangkutan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN Perubahan dan Pasal 44 ayat (1) UUJN Perubahan tidak akan terpenuhi dan akan menimbulkan cacat hukum. Permasalahan ini hanya bisa diselesaikan dengan dilakukannya penandatanganan ulang semua pihak dihadapan Notaris yang ditunjuk oleh MPD atau Notaris lain yang dipilih para pihak.

Terhadap minuta akta yang telah ditandatangani oleh para pihak, para saksi dan Notaris akan tetapi belum sempat dikeluarkan salinan akta maka

Notaris yang ditunjuk oleh MPD selaku pemegang protokol dengan berdasarkan pada Surat Keputusan penunjukan tersebut bisa mengeluarkan salinan akta. Tentunya Notaris pemegang protokol tidak sembarangan dalam mengeluarkan salinan. Notaris yang membantu menyelesaikan pekerjaan yang tertunda harus yakin sebelum mengeluarkan salinan akta. Keterangan-keterangan dari para penghadap dan terutama dari para saksi sangat dibutuhkan untuk memperkuat keyakinan Notaris pemegang protokol dalam mengeluarkan salinan akta yang minuta aktanya telah ditandatangani di hadapan Notaris sebelum meninggal dunia.

Proses penyelesaian pekerjaan Notaris yang belum terselesaikan karena meninggalnya Notaris yang bersangkutan dengan bantuan Notaris lain untuk penyelesaiannya dimaksudkan agar terciptanya akta otentik sebagai alat bukti yang dikehendaki oleh para pihak serta terjaminnya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dalam akta, selain itu juga bertujuan untuk menjaga kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait di dalamnya sekaligus untuk menjaga kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Dari pembahasan di atas menunjukkan bahwa ketentuan mengenai perlindungan hukum terhadap masyarakat terkait dengan protokol Notaris belum diatur secara menyeluruh, khususnya terhadap pertanggungjawaban ahli waris Notaris yang tidak segera menyerahkan protokol Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh MPD sebagai Notaris pemegang protokol. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya ketentuan yang secara jelas mengatur mengenai sanksi bagi para ahli waris yang belum menyerahkan protokol Notaris sampai batas waktu tertentu. Dalam UUJN dan UUKN Perubahan hanya mengatur tentang prosedur peralihan dari protokol Notaris. Ironisnya MPD tidak konsisten dan tidak bisa melaksanakan kewenangannya. MPD yang oleh undang-undang sudah diberikan wewenang untuk mengambil protokol Notaris juga belum bisa melaksanakan kewenangannya dengan baik dan maksimal, bahkan kewenangannya MPD tersebut masih sering diabaikan, terbukti dengan masih banyaknya protokol Notaris yang masih belum terselesaikan.
2. Meninggalnya Notaris yang bersangkutan menyebabkan pekerjaan dari klien kantor ataupun rekanan kerja sudah tidak bisa dilanjutkan lagi. Penyelesaian pekerjaan yang tertunda tersebut hanya bisa diselesaikan dengan bantuan dari Notaris yang lain. Terhadap minuta akta yang telah ditandatangani oleh Notaris sebelum meninggal dunia bisa dikeluarkan salinan akta oleh Notaris lain selaku pemegang protokol dengan berdasarkan pada Surat Keputusan MPD yang memutuskan dan menunjuk Notaris tersebut selaku pemegang protokol. Akan tetapi terhadap minuta akta yang belum ditandatangani oleh Notaris sebelum meninggal dunia hanya bisa diselesaikan dengan cara dilakukan penandatanganan ulang oleh para klien.

B. Implikasi.

1. Minimnya sosialisasi mengenai protokol Notaris kepada Notaris, keluarga Notaris dan masyarakat menyebabkan minimnya pengetahuan dan pemahaman para ahli waris mengenai protokol Notaris sehingga menyebabkan masih banyak protokol Notaris yang masih terlantar dan belum ada penyerahan protokol Notaris dari ahli waris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh MPD sebagai Notaris pemegang protokol. Di sisi lain, MPD juga belum bisa melaksanakan kewenangannya secara maksimal meskipun dalam UUJN Perubahan telah memberikan kewenangan kepada MPD untuk mengambil protokol Notaris yang belum diserahkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Notaris yang bersangkutan meninggal dunia.
2. Meninggalnya seorang Notaris akan meninggalkan pekerjaan-pekerjaan pada kantor Notaris tersebut dan menyebabkan tidak bisa diwujudkan akta otentik. Para klien kantor akan sangat dirugikan dengan tidak terwujudnya akta otentik sebagai alat bukti yang dikehendaki oleh para pihak. Penyelesaian pekerjaan kantor Notaris yang tersebut hanya bisa diselesaikan dengan bantuan dari Notaris lain.

C. Saran.

1. Untuk kontribusi pemikiran dari rumusan permasalahan penelitian ini maka penulis memberikan saran agar pendidikan moral kepada keluarga Notaris ditanamkan sejak dini. Para ahli waris Notaris harus berkomitmen untuk segera menyelesaikan protokol Notaris, mengingat arti pentingnya protokol Notaris sebagai arsip Negara. Hal ini bukan merupakan suatu hal yang mudah, terlebih lagi menyangkut suatu hak dan kewajiban, perlu adanya pengetahuan dan pemahaman yang mendalam dari para ahli waris Notaris, dan masyarakat pada umumnya, oleh karena itu :
 - a. Disarankan kepada Notaris yang masih aktif agar saling konfirmasi dan saling koordinasi dengan sesama Notaris yang mempunyai kedekatan emosional dan amanah untuk saling berpesan agar membantu

menyelesaikan segala sesuatu terkait dengan protokol Notaris serta pekerjaan-pekerjaan yang tertunda, serta memberikan pemahaman kepada keluarganya dan para karyawannya terkait dengan arti pentingnya protokol Notaris, sehingga meskipun Notaris yang bersangkutan meninggal dunia terkait dengan protokol Notarisnya bisa terselesaikan.

- b. Disarankan kepada MPD agar lebih memberikan sosialisasi mengenai protokol Notaris kepada para Notaris yang masih aktif dan kepada masyarakat pada umumnya. MPD bisa menjalin kerja sama dengan organisasi Notaris di daerah setempat untuk memberikan sosialisasi hukum kepada masyarakat melalui media cetak maupun media elektronik. Selain itu Ketegasan MPD terutama mengenai protokol Notaris harus diterapkan sehingga apabila terjadi seorang Notaris meninggal dunia dan protokolnya belum diserahkan kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh MPD dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari maka dengan berpijak pada kewenangan dalam ketentuan Pasal 63 ayat (6) MPD segera mengambil protokol Notaris dari Notaris yang telah meninggal dunia. MPD mempunyai kewajiban melaksanakan undang-undang sekaligus kewajiban moral terhadap protokol Notaris demi kepentingan masyarakat secara luas.
- c. Disarankan kepada organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) di daerah setempat agar saling berkoordinasi dengan MPD terkait dengan protokol Notaris yang belum diserahkan oleh para ahli waris Notaris kepada Notaris lain selaku pemegang protokol. Organisasi Notaris harus mendorong MPD agar segera melaksanakan kewenangannya untuk segera mengambil protokol Notaris yang belum terselesaikan. Organisasi Notaris harus bekerja sama dengan MPD dalam hal memberikan sosialisasi hukum kepada masyarakat melalui media cetak maupun media elektronik untuk mengantisipasi permasalahan yang akan timbul kelak di kemudian hari.

2. Keberadaan Notaris lain yang ditunjuk oleh MPD selaku pemegang protokol sangat dibutuhkan untuk membantu penyelesaian pekerjaan-pekerjaan yang tertunda dikarenakan meninggalnya Notaris yang bersangkutan. Oleh karena itu apabila ada seorang Notaris yang meninggal dunia maka seharusnya MPD segera menunjuk Notaris lain selaku pemegang protokol Notaris yang telah meninggal dunia. Di sisi lain bagi Notaris yang masih aktif harus membiasakan diri dalam hal pembuatan akta dimana setelah membacakan akta di hadapan para pihak kemudian langsung menandatangani. Hal ini akan meminimalisir permasalahan yang akan muncul kelak dikemudian hari ketika Notaris yang bersangkutan meninggal dunia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- A. Hamid. S. Attamini, 2007, *Ilmu perundang-undangan, jenis, fungsi dan materi muatan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke enam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- A. Pitlo, 1986, *Pembuktian dan Daluwarsa*, PT Intermasa, Jakarta.
- A.M.W. Pranarka, 1987, *Epistemologi Dasar Suatu Pengantar*, CSIS, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana di Indonesia, Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Achmad Nasir Budiman & Sulaiman Saqib, 1990, *Teori dan Filsafat Hukum, Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan*, W. Freidman, Rajawali, Jakarta.
- Arief Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Bandung.
- Badudu dan Zain, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, cetakan Kedua belas, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bachsan Mustafa, 2003, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Citra Aditya Bakti. Bandung.
- C.A.Kraan, 2003, *De Authentieke Akte, Goud Quint BV*, Arnhem, 1984, hlm 143 dan 201 dalam Herlien Budiono, *Akte Notaris Melalui Media Elektronik*, Upgrading Refresing Course Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, 22-25 Januari.
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung.
- C.S.T Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu hukum dan Tata hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

- Darji Darmodiharjo dan Sidartha, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Eugenius Sumaryono, 2008, *Etika Profesi Hukum (Norma-Norma Bagi Penegak Hukum)*, Kanisius, Yogyakarta.
- Endang Saifuddin Anshari, 1982, *Ilmu, Filsafat, dan Agama*, Bina Ilmu, Surabaya.
- E. Utrecht, 1962, *Pengantar dalam hukum Indonesia*, Balai buku Ichtiar, Jakarta.
- Fred N. Kerlinger, 2012, *Asas-asas Penelitian Behavioral*, Edisi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, Cetakan Kelima, 1996, hlm.14. dalam Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.42.
- G.H.S. Lumban Tobing, 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet.5, Erlangga, Jakarta.
- Gie The Liang, 1982, *Teori-teori tentang Keadilan*, Super Sukses, Yogyakarta.
- H. Salim. HS, 2009, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Habib Adjie, 2008, *Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2008 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, cet.2, PT.Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2011, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- Hans Kelsen, 2007, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, terjemahan Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta.
- _____, 2006, *Teori Hukum Murni*, terjemahan Raisul Mutaqien, Nuansa & Nusa Media, Bandung.
- Harold H.Titus, 1984, *Living Issues in Philosophy*, terjemahan Persoalan-Persoalan Filsafat, Bulan Bintang, Jakarta.

- Indroharto, 1996, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Konstitusi Pers, Jakarta.
- J.J.J M. Wuisman, 1996, *Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, Jilid I, UI Press, Jakarta.
- Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Boymedia Publishing, Malang.
- Lili Rasjidi, I.B Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mochtar Kusumaatmaja dan B.Arief Sidharta, 1999, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian hukum*, Cetakan Ke-6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, dkk, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesia Administrative aw)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, cetakan ke delapan, Mandar maju, Bandung.
- Ridwan H.R, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,.
- Supriadi, 2008, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soegondo Notodisoerjo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

- Subekti, 1975, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cet. Sembilan. Intermasa, Jakarta.
- _____, 2005, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Setiono, 2005, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*. Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Tan Thong Kie, 2000, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Buku I, cetakan ke-2, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Teguh Prasetyo & Abdul Alim, 2007, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Teguh samudera, 1992, *Hukum Pembuktian dalam acara perdata*, Alumni, Bandung.
- Yudha Pandu, 2009, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Jabatan Notaris dan PPAT*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta.

Jurnal

- Bernadus Wibowo Suliantoro, 2003, "Refleksi tentang Hukum dan Kekuasaan", *Justitia et Pax*, Volume 23, Nomor 1.
- Djoko Sukisno, 2008, "Pengambilan Foto copi Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris", *Mimbar Hukum*, Volume 20, Nomor 1.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2009, "Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata", *Mimbar Hukum*, Volume 21, Nomor 2.
- _____, 2010, "Arti Pentingnya Pembuktian dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata", *Mimbar Hukum*, Volume 22, Nomor 2.
- Elina Paunio, 2009, "Beyond Predictability-Reflections on Legal Certainty and the Discourse Theory of Law in the EU Legal Order", *German Law Journal*, Vol.10 No.11, hlm. 2.
- Muriel Cattleya Maramis, 2012, "Tata Cara Pemanggilan Notaris untuk Kepentingan Proses Peradilan Pidana Berkaitan dengan Akta yang Dibuatnya". *Lex Crimen*, Volume 1, Nomor 1.
- Suharjono, 1995, "Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum", *Varia Peradilan* Tahun XI Nomor 123.

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), 2010, cet. September, Permata Pers.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2008, Permata Pers.

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.39-PW.07.10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.13-HT.03.10 Tahun 1993 tanggal 24 Februari 1993 tentang Pembinaan Notaris.

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tanggal 17 Januari 2003 tentang Kenotarisan.

Nota Kesepahaman Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia Dengan Ikatan Notaris Indonesia. No. Pol : B/1056/V/2006

Nota Kesepahaman Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia Dengan Ikatan Notaris Indonesia Nomor : 01/MOU/PP-INI/V/2006 Tentang Pembinaan Dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang Penegakan Hukum.

Nota Kesepahaman Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia Dengan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah No.Pol. : B/1055/V/2006.

Nota Kesepahaman Antara Kepolisian Negara Republik Indonesia Dengan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor : 05/PP-IPPAT/V/2006 Tentang Pembinaan Dan Peningkatan Profesionalisme Di Bidang Penegakan Hukum.

Perubahan Kode Etik Notaris Konggres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten tanggal 29-30 Mei 2015.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor M.03.HT.03.10. Tahun 2007 tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan dan Pemberhentian Notaris.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota,

Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah atau Janji Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta Dan Pemanggilan Notaris

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan.

Data Elektronik :

Andi Asrianti, 2013, *Teori Kewenangan*, diakses dari : URL:<http://andiasrianti.blogspot.com/2013/02/normal-0-false-false-false-en-us-zh-cn.html>, 12 Maret 2017, 11.30 WIB.

Anonim, 2011, diakses dari : <http://lekonslenterakonstitusi.blogspot.com/2011/06/pejabat-publik.html>. 10 April 2017, 11.30 WIB.

<http://kalamliano.bizhosting.com/indonesian.html>:1, 10 Mei 2017, 12.15 WIB.

<http://hasyimsoska.blogspot.com/2011/11/protokol-Notaris-dan-ppat.html>. 10 Mei 2017, 10.10 WIB.

<http://m.hukumonline.com/berita.baca/lt532c49f3cbb01/notaris-bingung-dimana-harus-menyimpan-protokol-notaris>, 22 Juni 2017, 10.30 WIB.

http://medianotaris.com/perlindungan_hukum_notaris_berita306.html, 3 Mei 2017, 11.05 WIB.

<http://www.indonesianotarycommunity.com/up-date-up-grade-kenotariatan/> 10 Maret 2017, 11.10 WIB.

<http://iorg.merdeka.com/peristiwa/kantor-notaris-di-bekasi-kebakaran-ratusan-dokumen-hangus.html>, 10 Maret 2017, 10.45 WIB.

Ketua Dewan Kehormatan Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) www.majalah.depukumham.go.id : 1, 12 Maret 2017, 10.15 WIB

Muntasir Syukri, (tanpa tahun), *Keadilan dalam Sorotan*, diakses dari: URL: [http://badilag.net/data/ARTIKEL/ARTIKEL%20KEADILAN%20DALAM%20SOROTAN%20\(1\).pdf](http://badilag.net/data/ARTIKEL/ARTIKEL%20KEADILAN%20DALAM%20SOROTAN%20(1).pdf), 8 Maret 2017, 11.45 WIB.

Mario A. Tedja, 2012, diakses dari: <http://mariotedja.blogspot.com/2012/12/teori-kepastian-dalam-prespektifhukum.html>, 18 Mei 2017 11.30 WIB.

Oktavianus Sinaga, <http://osinaga.wordpress.com>, 12 Maret 2017, 11.15 WIB.

Rasjuddin Dungge, (tanpa tahun), *Kepastian Hukum*, diakses dari : <http://rasjuddin.blogspot.com/>, 15 Mei 2017, 15.15 WIB.

Sonny Pungus, 2011, *Teori Kewenangan*, diakses dari : URL: <http://sonny-tobelo.blogspot.com/2011/01/teori-kewenangan.html>, 17 Maret 2017, 11.00 WIB.

www.wikipediaIndonesia.com, *Ensiklopedia*, 22 Juni 2017, 10.15 WIB.

Widhi Yuliawan, 2013, diakses dari: <http://widhiyuliawan.blogspot.com/> 2013/04/akta-kelahiran.html, 14 Mei 2017, 12.30 WIB.

Yance Arizona, <http://yancearizona.wordpress.com/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>, 15 Mei 2017, 11.30 WIB.